



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
2025

STRATEGI PENINGKATAN AKSES KEBEKERJAAN LULUSAN SMK DI LUAR NEGERI



#PENDIDIKAN
BERMUTU
UNTUK SEMUA

KEMENDIKDAS MEN
RAMAH

SMK
BISA-HEBAT
SIMPAN KEMAHIRAN - CARIKUN - BERKUALITAS - BERKREATIF

Pengarah

Tatang Muttaqin, S.Sos., M.Ed., Ph.D.,

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus.

Dwi Setiawan Susanto, S.E., M.Si, Ak.,

Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Kerja Luar Negeri, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Penanggung Jawab

Dr. Arie Wibowo Khurniawan, S.Si., M.Ak.,

Direktur Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian, Pendidikan Dasar dan Menengah

Tim Penulis

Arie Wibowo Khurniawan

Sartana

Bangkit Ari Murti

Tri Haryani

Tim Penyusun

Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Dr. Arie Wibowo Khurniawan, S.Si., M.Ak

Sartana, S.Pd., M.M.,

Dr. Wardani Sugiyanto, M.Pd

Bangkit Ari Murti, S.T., M.AP.

Dr. Donny Sunarto, S.Kom., M.A

Erma Herawati, S.E., M.E.

Dini Pratiwindya, S.Pd., M.Pd

Haryanto, S.Kom., M.Si.

Tri Haryani, S.Pd.

Lia Amalia, S.S.

Agricynthia Pratiwi Dharma, S.I.Kom.

Amalia Istiana, S.T.

Aprillia Kurniasih, S.E.

Desak Ketut Intan Rahayu, A.Md.

Satrio Nugroho, S.Sos., M.Si.

Bagas Sandiya Cipta, A.Md.

Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri

Tony Wibawa, S.IP.

Rosehasna Aurellia Putri Wirastomo, S.I. Kom

Layout/Desain

Halim Priantoro

Ari

Muhamad Raidinoor Pasha, S.Kom.

Bagas Aditia, S.Sos.

Cetakan I

Tahun 2025

ISBN: 978-634-00-2170-7

Diterbitkan Oleh :

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Republik Indonesia

Dikeluarkan oleh :

Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Kata Pengantar

Direktur Sekolah Menengah Kejuruan
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus,
dan Pendidikan Layanan Khusus
Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Alhamdulillah, berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan dapat menyusun Buku. Buku pedoman ini disusun sebagai upaya membuka jalan yang lebih luas bagi lulusan SMK dapat bekerja di luar negeri. Dunia kerja kini tidak lagi terbatas pada dalam negeri saja. Kesempatan di luar negeri semakin terbuka, dan lulusan SMK harus siap bersaing, beradaptasi, serta memahami standar kerja global, budaya, dan aturan di negara tujuan.

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi pegangan praktis bagi sekolah, pemerintah daerah, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta pihak terkait lainnya. Tujuannya agar lulusan SMK dapat mengakses peluang kerja luar negeri dengan aman, percaya diri, dan tetap membawa nama baik Indonesia. Kami menyadari bahwa isi buku ini masih perlu terus disempurnakan sesuai dengan dinamika kebutuhan tenaga kerja global dan perkembangan regulasi. Oleh karena itu, masukan, saran, dan dukungan dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan dan kebermanfaatannya.

Akhir kata, semoga Buku Pedoman Strategi Peningkatan Akses Kebekerjaan Lulusan SMK di Luar Negeri ini dapat membantu membuka jalan bagi generasi muda SMK Indonesia untuk menembus pasar kerja dunia dan berkontribusi nyata di kancah internasional.

Jakarta, September 2025

Direktur Sekolah Menengah Kejuruan

Dr. Arie Wibowo Khurniawan, S.Si., M.Ak.

Kata Sambutan

Direktur Jenderal Promosi Dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Om swastiastu, Namoh buddhaya, Salam kebajikan, Rahayu.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Pedoman Strategi Peningkatan Akses Kebekerjaan Lulusan SMK di Luar Negeri ini dapat disusun dan diterbitkan sebagai salah satu instrumen strategis untuk menjembatani dunia pendidikan vokasi dengan peluang kerja luar negeri yang tersedia secara global.

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI)/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melalui Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri memiliki mandat strategis untuk memperkuat perlindungan PMI serta memperluas akses dan memperkuat kesiapan sumber daya manusia Indonesia dalam mengisi pasar kerja internasional secara aman, kompeten, dan bermartabat. Dalam konteks ini, generasi muda lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan potensi besar yang harus kita arahkan, persiapkan, dan fasilitasi agar dapat bersaing secara optimal di pasar tenaga kerja luar negeri.

Pedoman ini menjadi salah satu wujud nyata implementasi kerja sama antar kementerian, khususnya melalui Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kolaborasi ini merupakan bentuk sinergi kebijakan lintas sektor dalam rangka menyiapkan lulusan SMK yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga memiliki kesiapan mental, budaya, dan legalitas untuk bekerja di luar negeri.

Isi dari pedoman ini dirancang agar menjadi panduan praktis bagi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota khusus daerah Papua, mitra dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta lembaga pelatihan kerja dalam menyiapkan lulusan SMK untuk mengakses peluang kerja luar

negeri. Penyiapan dimulai dari integrasi kurikulum berbasis pasar kerja luar negeri, pelatihan keterampilan dan bahasa asing, sertifikasi kompetensi, hingga mekanisme penempatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip perlindungan pekerja migran.

Harapan kami, pedoman ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pemangku kepentingan dalam ekosistem pendidikan vokasi dan penempatan tenaga kerja luar negeri, sehingga membuka jalan bagi generasi muda Indonesia, khususnya lulusan SMK, untuk memperoleh pekerjaan yang layak, produktif, dan aman di negara tujuan.

Akhir kata, Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga upaya kolaborasi bersama ini menjadi bagian dari transformasi pendidikan vokasi dan ketenagakerjaan Indonesia menuju arah yang lebih baik.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Jakarta, September 2025

**Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia**

Dwi Setiawan Susanto, S.E., M.Si, Ak.

Kata Sambutan

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus,
dan Pendidikan Layanan Khusus
Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Om swastiastu, Namo buddhaya, Salam kebajikan, Rahayu.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Pedoman Strategi Peningkatan Akses Kebekerjaan Lulusan SMK di Luar Negeri ini dapat disusun dan diterbitkan sebagai salah satu instrumen strategis untuk menjembatani dunia pendidikan vokasi dengan peluang kerja luar negeri yang tersedia secara global.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus dalam menjalankan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia, salah satu amanatnya adalah untuk menghasilkan lulusan SMK yang kompeten, yang berdaya saing dan siap menghadapi tantangan dan dinamika perkembangan nasional maupun global.

Pedoman ini hadir sebagai respons nyata atas amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menekankan pentingnya pelindungan pekerja migran sejak pra-penempatan, serta Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang menggarisbawahi urgensi penyelarasan pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia kerja, termasuk di tingkat global. Inisiatif ini juga selaras dengan penguatan keterampilan lulusan vokasi agar mampu bersaing dan berkontribusi di pasar kerja internasional.

Kami menyadari bahwa pasar kerja nasional dihadapkan pada dinamika yang kompleks, menuntut lulusan dengan kompetensi tinggi dan adaptabilitas. Di sisi lain, globalisasi membuka lebar peluang kerja yang signifikan di luar negeri, terutama di sektor-sektor yang membutuhkan keahlian spesifik.

Lulusan SMK, dengan kompetensi vokasi yang kuat, memiliki potensi besar untuk mengisi kekosongan talenta di berbagai negara. Namun, akses terhadap kesempatan ini haruslah difasilitasi dengan baik, memastikan mereka tidak hanya kompeten, tetapi juga terlindungi dari berbagai risiko yang mungkin timbul.

Untuk menjawab tantangan sekaligus memanfaatkan peluang tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus mengambil langkah strategis dengan menyusun pedoman ini. Pedoman ini bukan sekadar panduan, melainkan fondasi bagi SMK untuk memperkuat kurikulum, meningkatkan kapasitas guru, serta membangun ekosistem yang mendukung penyiapan lulusan berdaya saing global. Penyusunan pedoman ini merupakan wujud nyata kolaborasi erat antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI)/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Sinergi ini bertujuan untuk memastikan seluruh proses penyiapan hingga penempatan PMI lulusan SMK berjalan sesuai prosedur, transparan, dan memberikan pelindungan optimal bagi para calon pekerja migran.

Besar harapan Kami, pedoman ini dapat menjadi acuan yang jelas dan komprehensif bagi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan SMK dalam mempersiapkan lulusannya untuk memasuki pasar kerja internasional. Dengan implementasi pedoman ini, kita berharap dapat mencetak lulusan SMK yang tidak hanya siap bekerja, tetapi juga berdaya saing tinggi, bermartabat, dan mampu menjadi duta bangsa yang positif di kancah global.

Akhir kata, mari kita bersama-sama mewujudkan visi pendidikan vokasi yang relevan, adaptif, dan mampu menghasilkan talenta-talenta unggul kebanggaan Indonesia. Semoga pedoman ini membawa manfaat besar bagi kemajuan pendidikan vokasi di tanah air dan masa depan cerah para lulusan SMK.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Jakarta, September 2025

**Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus,
dan Pendidikan Layanan Khusus
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah**

Tatang Muttaqin, S.Sos., M.Ed., Ph.D.

Daftar Isi

Kata Pengantar	Direktur Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia.....	iii
Kata Sambutan	Direktur Jenderal Promosi Dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	iv
Kata Sambutan	Kata Sambutan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia	vi
Daftar Isi		viii
Daftar Tabel		x
Daftar Gambar		xi
BAB I	Pendahuluan	1
	Latar Belakang.....	2
	Tujuan Penyusunan Pedoman	4
	Sasaran	5
	Dasar Hukum dan Kebijakan Terkait.....	5
	Definisi Umum Seputar Kebekerjaan Luar Negeri.....	6
BAB II	Profil dan Peluang Akses Kebekerjaan Luar Negeri Bagi Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan	8
	Profil Pekerja Migran Indonesia (PMI) Lulusan SMK.....	9
	Peran Strategis Lulusan SMK Dalam Ketenagakerjaan Luar Negeri	13
	Peluang dan Manfaat Mengakses Pasar Kerja Luar Negeri.....	16
	Strategi Menghadapi Peluang dan Manfaat	21
	Kompetensi dan Kualifikasi yang Dibutuhkan Pasar Luar Negeri	22
	Skema Penempatan Untuk Bekerja Di Luar Negeri	24

BAB III	Strategi Penyiapan Lulusan SMK Untuk Akses Kebekerjaan Luar Negeri	
	Identifikasi Sektor Prioritas dan Negara Tujuan.....	28
	Integrasi Kurikulum Berbasis Kebutuhan Luar Negeri.....	30
	Pengembangan Kurikulum Berbasis Kebekerjaan Luar Negeri	31
	Implementasi Integrasi Kurikulum.....	32
	Skema Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Internasional	33
	Penguatan Soft Skill, Literasi Bahasa Asing,dan Adaptasi Budaya Negara Tujuan.....	36
	Kemitraan SMK dengan P3MI.....	38
	Skema Model Sistemik atau Skema Integratif Untuk SMK 4 Tahun + P3MI	39
BAB IV	Tata Kelola, Koordinasi, dan Mekanisme Implementasi Program	
	Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi/Kabupaten/Kota.....	42
	Dinas Pendidikan Provinsi (Disdikprov)	43
	Mekanisme Sosialisasi Program Kepada Murid dan Orang Tua.....	43
	Skema Pendampingan dan Pembinaan Berjenjang.....	47
	Penguatan Literasi Regulasi Terkait PMI dan Negara Tujuan.....	50
BAB V	Mekanisme Rekrutmen dan Penempatan Lulusan.....	53
	Tahapan Umum Rekrutmen Calon Pekerja Migran.....	54
BAB VI	Keberlanjutan Akses Kebekerjaan Luar Negeri Bagi Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan	
	Pendanaan	60
	Strategi Penguatan Keberlanjutan.....	62
BAB VII	Pencegahan Praktik Nonprosedural dan Perdagangan Orang	63
	Waspada Perdagangan Orang dan Praktik Penempatan Nonprosedural.....	64
	Cakupan TPPO	65
	Modus Calo P3MI Nonprosedural	66
	Korban TPPO	67
	Kejadian Kasus yang Pernah Terjadi Di Luar Negeri.....	67
BAB VIII	Perlindungan dan Pendampingan Oleh Perwakilan Pemerintah RI	
	Perlindungan Sebelum Bekerja	70
	Perlindungan Selama Bekerja	71
	Perlindungan Setelah Bekerja	72
BAB IX	Penutup.....	73

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Laporan Publikasi Data PMI tahun 2024	12
Tabel 2.2	Data Profil Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Ajaran 2024	13
Tabel 2.3	Peluang Kebekerjaan di Luar Negeri.....	20
Tabel 2.4	Perbandingan Antara Program SSW dan SP2T	25
Tabel 3.1.	Model Pengembangan SMK 4 Tahun Terintegrasi Kebekerjaan Luar Negeri	39
Tabel 7.1.	Larangan untuk Tujuan Pekerjaan di Luar Negeri.....	68

Daftar Gambar

Gambar 2.1	Penempatan Pekerja Indonesia Tahun 2024 Berdasarkan Kawasan	10
Gambar 2.2	Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Tahun 2024 Berdasarkan 5 Negara Penempatan Tertinggi	11
Gambar 2.3	Laporan Publikasi Data PMI tahun 2024.....	11
Gambar 3.1.	Flowchart Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Internasional...	35
Gambar 3.2.	Flowchart Seleksi, Diklat dan Sertifikasi Kebekerjaan Luar Negeri	40
Gambar 4.1.	Flowchart Mekanisme Sosialisasi Program Kebekerjaan di Luar Negeri.....	44
Gambar 4.2.	Flowchart Mekanisme Sosialisasi Program Kebekerjaan di Luar Negeri.....	47

BAB 1

Pendahuluan





Latar Belakang

Di era globalisasi, mobilitas tenaga kerja antarnegara semakin meningkat. Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah tenaga kerja besar memiliki potensi besar dalam mengisi kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor di tingkat internasional. Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional melalui devisa yang dihasilkan. Untuk menjadi PMI memiliki tantangan yang dihadapi seperti keterampilan atau keahlian spesifik, mengetahui lingkup perlindungan hukum, dan sosial serta budaya di negara tujuan bekerja, yang menjadi perhatian dalam persiapan SMK untuk lulusannya bekerja di luar negeri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), tujuan utama didirikannya SMK adalah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang tertentu dan siap langsung memasuki dunia kerja. Dalam konteks kebutuhan tenaga kerja luar negeri, SMK memiliki potensi besar dalam menyiapkan sumber daya manusia karena memiliki daya saing keterampilan, keahlian teknis, kemampuan beradaptasi, serta keterampilan komunikasi, sosial dan budaya yang diperlukan untuk bekerja di lingkungan internasional.

Seiring dengan perkembangan industri dan digitalisasi di luar negeri maupun dalam negeri, SMK juga terus bertransformasi untuk memastikan bahwa kurikulum dan metode pembelajarannya tetap relevan dengan kebutuhan pasar kerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sejalan dengan itu, Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 244/M/2024 tentang Spektrum Keahlian dan Konversi Spektrum Keahlian SMK pada Kurikulum Merdeka semakin memperkuat relevansi program SMK dengan kebutuhan tenaga kerja global. Keputusan ini menetapkan spektrum keahlian yang lebih adaptif terhadap kebutuhan industri dan dunia kerja, termasuk sektor-sektor yang relevan dengan peluang kerja di luar negeri.

Data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang kini menjadi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menunjukkan bahwa pada tahun 2024, terdapat 297.434 Layanan Penempatan, meningkat 0,11% dibandingkan tahun sebelumnya. Layanan Penempatan didominasi sektor informal, mengalami peningkatan 9,17% dari tahun sebelumnya. Layanan Penempatan melalui skema Private to Private (P to P) menyumbang 79,47% dari total layanan penempatan.

Meskipun peluang kerja di luar negeri semakin besar, terdapat berbagai tantangan dalam penyiapan dan penempatan pekerja migran Indonesia di negara tujuan antara lain memenuhi keterampilan teknis yang sesuai dengan standar negara tujuan, penguasaan bahasa asing, biaya keberangkatan, serta perlindungan hukum perlu diperkuat. Calon Pekerja Migran harus sudah memahami prosedur resmi untuk menghindari penipuan dan perdagangan manusia.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan sinergi antara KP2MI/BP2MI dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Melalui Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri KP2MI dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, diharapkan dapat terwujud integrasi antara dunia pendidikan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja luar negeri.

Sebagai salah satu upaya nyata Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus bersama dengan Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri menyusun Pedoman Strategi Peningkatan Akses Kebekerjaan Lulusan SMK di Luar Negeri sebagai acuan bagi satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan serta pemangku kebijakan lainnya dalam proses penyiapan tenaga kerja yang kompeten, terlindungi, dan memiliki daya saing internasional.

Tujuan Penyusunan Pedoman



Menyediakan pedoman bagi SMK dalam menyiapkan murid yang siap bekerja di luar negeri.



Mengembangkan kurikulum dan pelatihan berbasis kebutuhan pasar tenaga kerja luar negeri.



Memperkuat kemitraan antara SMK, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta lembaga pemerintah terkait dalam rangka penyiapan dan penempatan tenaga kerja ke luar negeri.



Memberikan pengetahuan perlindungan dan kesejahteraan PMI lulusan SMK melalui mekanisme penempatan yang aman dan resmi.



Meningkatkan kesiapan lulusan SMK dalam aspek keterampilan teknis, bahasa, dan budaya agar dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja luar negeri.

Sasaran

Pedoman ini untuk lebih siap dalam menyiapkan calon lulusan SMK agar bisa bekerja di luar negeri dan sampai mana peran SMK dalam rangka penyiapan lulusan SMK tersebut. Adapun, sasaran pedoman ini meliputi:

1. Sekolah Menengah Kejuruan;
2. Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Dinas Tenaga Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota;
4. Murid SMK dan lulusan SMK; dan
5. Orang tua murid SMK

Dasar Hukum dan Kebijakan Terkait

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 244/M/2024 tentang Spektrum Keahlian dan Konversi Spektrum Keahlian SMK pada Kurikulum Merdeka

Definisi Umum

Seputar Kebekerjaan Luar Negeri

1. *Sending Organization* (SO) adalah lembaga atau organisasi yang memiliki izin resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merekrut, melatih, dan mengirimkan tenaga kerja atau peserta magang ke luar negeri.
2. Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja. lembaga pelatihan kerja (LPK) yang telah menerima izin resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk melakukan perekrutan atau penempatan tenaga kerja, termasuk pemagangan, ke luar negeri.
3. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
4. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
5. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia
6. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum , ekonomi, dan sosial.
7. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut KP2MI adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
8. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP3MI merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

9. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) merupakan kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden untuk membidangi urusan pemerintahan di bidang luar negeri, di antaranya diplomasi, perlindungan WNI di luar negeri, perjanjian internasional, perwakilan Indonesia di negara lain, dan protokoler negara.
10. Perwakilan RI adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia di luar negeri. Perwakilan ini secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia di negara penerima atau organisasi internasional.
11. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
12. Pemagangan di Luar Negeri adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara utuh dan terpadu di Indonesia dan di luar negeri oleh lembaga pelatihan kerja atau perusahaan atau instansi pemerintah atau lembaga pendidikan di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur dan/atau pekerja yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
13. Praktik Kerja Lapangan yang selanjutnya disingkat PKL adalah pembelajaran bagi Peserta Didik pada SMK/MAK, SMALB, dan LKP yang dilaksanakan melalui praktik kerja di dunia kerja dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan dunia kerja. PKL biasanya dilakukan di perusahaan, instansi pemerintahan, atau lembaga yang relevan dengan bidang studi peserta. Durasi PKL bervariasi, tergantung pada regulasi sekolah. Peserta PKL akan menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh tempat PKL, sesuai dengan bidang keahliannya. PKL biasanya diawasi dan dibimbing oleh guru pembimbing.

Dari definisi dan perbedaan utama antara pemagangan dan kerja di luar negeri terletak pada tujuan, durasi, dan jenis visa yang digunakan. Pemagangan lebih berfokus pada pembelajaran dan pengembangan keterampilan, sedangkan kerja di luar negeri bertujuan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih formal dan berpotensi lebih lama.

Jadi kesimpulannya magang dan praktek kerja lapangan bukan bagian dari bekerja di luar negeri atau PMI.

BAB 2

Profil dan Peluang Akses Kebekerjaan Luar Negeri Bagi Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan



Profil Pekerja Migran Indonesia (PMI) Lulusan SMK

Penempatan pekerja Indonesia di luar negeri lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) menjadi salah satu peluang untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial serta mengurangi angka pengangguran lulusan SMK di Indonesia. Sebagian besar dari daerah provinsi/kabupaten/kota di Indonesia sangat terbatas lowongan untuk lulusan SMK, di mana jenjang SMK meluluskan setiap tahun rata-rata 1,5 juta di luar jenjang SMA, politeknik, perguruan tinggi dan lembaga pelatihan. Namun dengan lulusan tersebut tidak berbanding lurus dengan peluang kerja yang tersedia, tentunya akan meningkatnya angka lulusan SMK tidak memiliki pekerjaan di Indonesia. Lulusan SMK mengambil peluang menjadi PMI akan lebih menguntungkan karena peningkatkan ekonomi personal yang signifikan.

Lulusan SMK dengan menjadi PMI dapat mendorong ekonomi keluarganya lebih sejahtera juga menstabilkan perekonomian dan mendukung pertumbuhan ekonomi keluarga yang di Indonesia. Dengan kesejahteraan keluarga meningkat akan meningkatkan kualitas hidup seperti kebutuhan konsumsi, pendidikan, kesehatan, dan investasi dengan menjadi modal untuk memulai usaha kecil dan menengah (UMKM) di daerah asal.

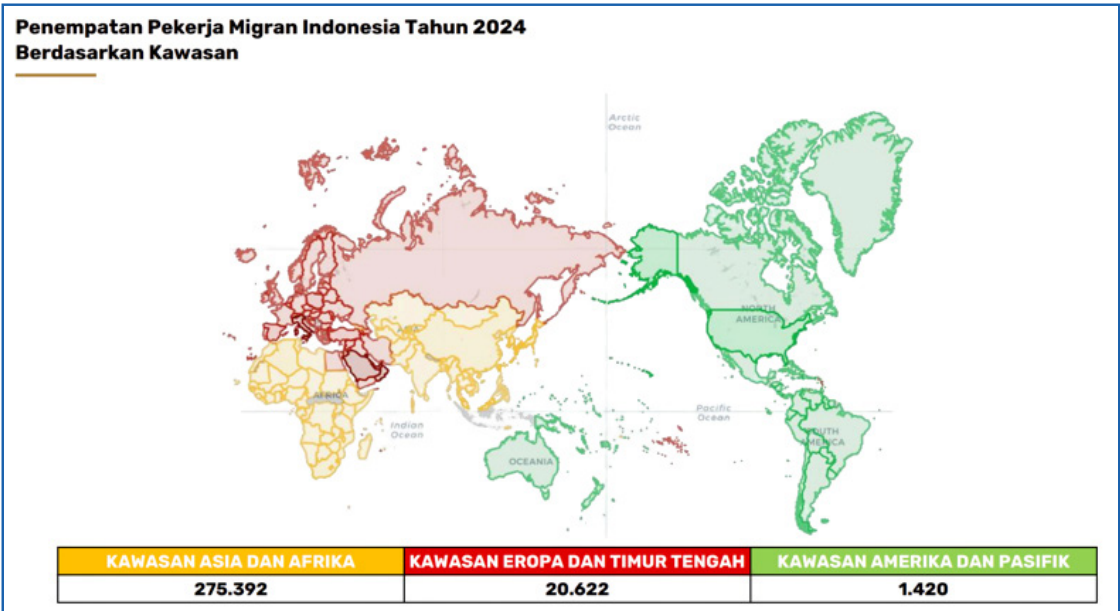
Peran Pekerja Migran Indonesia sangat besar bagi kontribusi penerimaan negara. Jumlah remitansi (pengiriman uang dari pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri kembali ke Indonesia) ini merupakan kontribusi penting bagi perekonomian Indonesia. Menurut Data Bank Indonesia remitansi atau pengiriman uang lintas negara dari pekerja migran Indonesia mencapai Rp 251,1 triliun pada 2024. Jumlah ini bersumber dari 297 ribu pekerja migran yang berada di luar negeri. Angka ini meningkat sebesar 14% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp 220,3 triliun.

Berdasarkan rangkuman Penempatan Pekerja Migran Indonesia periode tahun 2022, 2023, 2024 yang dikeluarkan pusat data dan informasi KP2MI jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) mencapai 297.434 orang sepanjang 2024. Jumlah tersebut meningkat 0,11% dibanding tahun sebelumnya tahun 2023 yang sebanyak 297.108 orang



dan Tahun 2022 ada di 200.717 orang. Mobilitas tenaga kerja melintasi batas wilayah negara bukanlah suatu hal yang baru di berbagai belahan dunia. Saat ini pemerintah lebih membuka lebar kesempatan menjadi PMI karena memiliki keterbatasan dalam kesempatan kerja didalam negeri ke negara-negara maju yang kekurangan tenaga kerja dalam jenis-jenis pekerjaan tertentu.

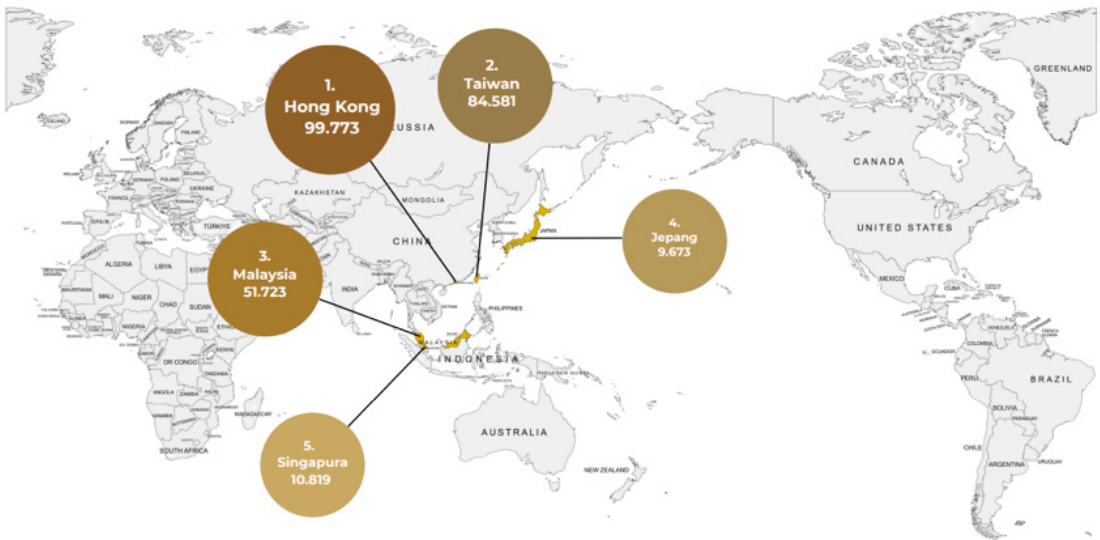
Berdasarkan data tahun 2024 penempatan pekerja migran Indonesia tersebar di kawasan Asia dan Afrika sebanyak 275.392 orang, kawasan Eropa dan Timur Tengah sebanyak 20.622 dan kawasan Amerika dan Pasifik sebanyak 1420 orang.



Gambar 2.1 Penempatan Pekerja Indonesia Tahun 2024 Berdasarkan Kawasan

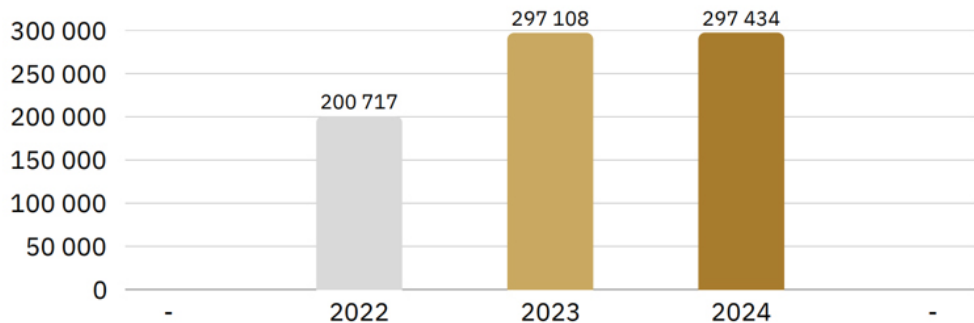
Adapun sebaran negara-negara di Kawasan Asia masih mendominasi penempatan pekerja migran Indonesia periode 2022-2024. Pada tahun 2024, penempatan pekerja migran Indonesia terkonsentrasi di Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Jepang dan Singapura. Secara umum, jumlah penempatan mengalami peningkatan, akan tetapi di tahun 2024 jumlah penempatan ke Malaysia menurun dari tahun sebelumnya.

**Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Tahun 2024
Berdasarkan 5 Negara Penempatan Tertinggi**



Gambar 2.2 Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Tahun 2024 Berdasarkan 5 Negara Penempatan Tertinggi

Penempatan Pekerja Migran Indonesia periode tahun 2022, 2023, 2024



Gambar 2.3 Laporan Publikasi Data PMI tahun 2024

*sumber: Pusat data dan Informasi KP2MI

Berdasarkan sumber data yang sama sebanyak 347.538 lulusan SMA/K yang menjadi PMI per tahun 2024 atau sebesar 45,31% dari seluruh Pekerja Migran Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa peluang pasar kerja luar negeri masih cukup tinggi untuk lulusan SMA/K. Untuk menyambut peluang tersebut, SMK perlu menyiapkan strategi dalam membuka peluang akses ke pekerjaan luar negeri bagi murid-muridnya.

Data dari pusat data dan informasi merilis data penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia KP2MI telah merilis Laporan Tahunan periode 2024

PENDIDIKAN	2022	2023	2024	JUMLAH
SD	39.246	68.544	69.421	177.211
SMP	64.014	92.564	91.542	248.120
SMA/SMK	90.954	128.104	128.480	347.538
Diploma	4.244	4.453	4.505	13.202
Sarjana	2.212	3.383	3.421	9.016
Pasca Sarjana	47	60	65	172
Jumlah	200.717	297.108	297.434	795.259

Tabel 2.1 Laporan Publikasi Data PMI tahun 2024

*sumber: Pusat data dan Informasi KP2MI

Peran Strategis Lulusan SMK Dalam Ketenagakerjaan Luar Negeri

Tujuan pendidikan di SMK adalah mempersiapkan murid untuk bekerja dan berwirausaha, selain itu juga lulusan SMK mempunyai kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan tinggi untuk lebih mengembangkan kapasitas diri murid atau sering disingkat BMW (Bekerja, Melanjutkan, Wirausaha) mendorong lulusan SMK untuk memilih salah satu atau kombinasi dari tiga pilihan tersebut untuk masa depan mereka setelah lulus. Lulusan SMK dapat mengambil peluang menjadi PMI untuk meningkatkan pendapatan yang lebih baik.

Setiap tahunnya, SMK meluluskan kurang lebih satu juta murid dari berbagai bidang keahlian. Di tahun 2024, SMK telah meluluskan 1.551.733 murid dengan berbagai bidang keahlian. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan Kemendikdasmen, berikut profil lulusan SMK tahun 2024 berdasarkan bidang keahlian:

No	Bidang Keahlian	Jumlah Lulusan SMK	Persentase
1	Agribisnis dan Agroteknologi	67.829	4,37%
2	Bisnis dan Manajemen	340.090	21,92%
3	Energi dan Pertambangan	16.986	1,09%
4	Kemaritiman	22.757	1,47%
5	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	57.991	3,74%
6	Pariwisata	119.378	7,69%
7	Seni dan Ekonomi Kreatif	50.853	3,28%
8	Teknologi Informasi	371.883	23,97%
9	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	468.568	30,20%
10	Teknologi Konstruksi dan Properti	35.398	2,28%
Total		1.551.733	100%

Tabel 2.2 Data Profil Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Ajaran 2024

*sumber: Data Pokok Pendidikan Kemendikdasmen

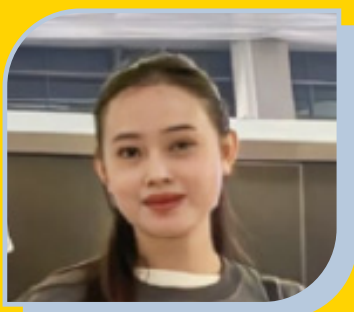
Apabila setiap tahunnya 5% dari lulusan SMK mengambil peluang menjadi PMI, maka akan meningkatkan keserapan bekerja lulusan SMK secara akumulatif dan meningkatkan remitansi negara dan perekonomian daerah asal lulusan SMK berada. Dengan 14 bidang keahlian yang disediakan di SMK menjadi peluang besar lulusan SMK mengisi lowongan pekerjaan di luar negeri.

Untuk dapat memanfaatkan peluang kerja luar negeri yang ada, diperlukan adanya informasi lowongan kerja yang akurat. Selain itu juga dibutuhkan adanya informasi terkait penyiapan untuk mendukung penempatan melalui proses yang aman dan resmi. Untuk itu, SMK perlu melakukan koordinasi intensif dengan KP2MI/BP2MI atau melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) KP2MI/BP2MI yakni BP3MI yang tersebar di wilayah Republik Indonesia. Apabila tidak terdapat BP3MI, Kepala SMK dapat berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi/Kabupaten/Kota setempat. Selain melalui KP2MI/BP2MI atau BP3MI, SMK dapat mengakses informasi lowongan pekerjaan di luar negeri melalui laman resmi <https://siskop2mi.bp2mi.go.id/>.

Banyak lulusan SMK yang berhasil bekerja di luar negeri, membuktikan bahwa pendidikan kejuruan juga bisa menjadi jembatan menuju karir internasional. Beberapa contohnya adalah bekerja di Jepang dalam bidang manufaktur atau perhotelan, atau bekerja di kapal pesiar dengan gaji yang menjanjikan. Kunci sukses mereka seringkali terletak pada kemampuan teknis, penguasaan bahasa asing, dan mentalitas yang siap menghadapi tantangan baru.



Beberapa alumni SMK menjadi PMI yang berhasil:



- ▶ **Kurnia Asyhary**, lulusan SMK Muhammadiyah Salaman Kabupaten Magelang, Jawa Tengah yang sukses bekerja di kapal pesiar dengan gaji 1.000 dollar per bulan

foto: kompas.com/edu



- ▶ **Irfan Nofiyanto**, lulusan SMK Muhammadiyah 1 Blora yang sukses bekerja menjadi chef di restoran Jepang di Chicago, Amerika Serikat dengan gaji 15 – 20 juta per bulan

foto: instagram.com/irfan.nofiyanto/



- ▶ **Anita Nadya Sari**, alumni SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang jurusan asisten keperawatan bekerja sebagai perawat, dengan gaji per bulan sekitar Rp 15 juta – Rp 20 juta. Gaji tersebut belum termasuk bonus dari pemerintah Jepang yang dicairkan setiap satu semester sekali yakni pada bulan Juni dan bulan Desember. Jika semua ditotal pendapatan yang diperolehnya dalam setahun bisa mencapai Rp 150 juta – Rp 200 juta

foto: smkmuh1kotamalang.sch.id

Pengalaman cerita kesuksesan dari 3 alumni di atas menjadi beberapa contoh keberhasilan dari banyak kesuksesan lulusan SMK yang berani mengambil kesempatan bekerja di luar negeri.

Peluang dan Manfaat Mengakses Pasar Kerja Luar Negeri

Peluang bagi lulusan SMK untuk mengakses pasar kerja internasional terus bertambah dan berkembang seiring dengan dinamika ekonomi dan demografi global. Berbagai sektor industri di negara-negara maju maupun berkembang, seperti manufaktur, konstruksi, hospitality, perawatan kesehatan, dan sektor jasa, masih membutuhkan tenaga kerja terampil. Misalnya, negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Jerman, dan beberapa negara di Timur Tengah, menghadapi tantangan populasi menua dan kekurangan tenaga kerja produktif di bidang tertentu.

Hal ini membuka peluang besar bagi tenaga kerja Indonesia, khususnya lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), untuk mengisi permintaan tenaga kerja profesional, terampil, dan siap adaptif di berbagai negara.



Menurut Dokumen Analisis Pasar Kerja Luar Negeri dan Analisis Kebutuhan Pelatihan yang dirilis Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Tahun 2024, sektor-sektor industri yang membutuhkan tenaga kerja terampil, beserta negara tujuannya, adalah sebagai berikut:

Teknik dan Sains Profesional	: Belgia, Swedia, Estonia, Denmark, Spanyol, dan Slovakia.
Pendidikan	: Amerika Serikat, Polandia, Republik Ceko, Slovakia, Irlandia, Hungaria, Estonia, dan Latvia.
Konstruksi	: Belanda, Swiss, Inggris, Italia, Yunani, Amerika Serikat, Kanada, Lituania, Swedia, Spanyol, dan Luxembourg
Riil Estate	: Irlandia, Finlandia, Denmark, Swedia, Estonia, Luxembourg, dan Latvia.
Sektor Jasa Lainnya	: Belanda, Austria, dan Swiss.
Manufaktur	: Yunani, Luxembourg, Denmark, dan Inggris.
Transportasi dan Pergudangan	: Austria, Lituania, Slovenia, Slovakia, Swedia, Polandia, dan Latvia.
Perdagangan Besar dan Retail	: Yunani, Portugal, Denmark, Austria, Republik Ceko, dan Slovakia
Seni dan Hiburan	: Yunani, Republik Ceko, dan Slovakia
Administrasi dan Jasa Pendukung	: Hungaria, Latvia, Austria, Portugal, dan Jerman
Jasa Akomodasi dan Makanan	: Italia, Norwegia, Finlandia, Republik Ceko, dan Slovakia

2.3.1. Manfaat Bekerja sebagai PMI di Luar Negeri

1. Pengembangan kompetensi dan karir yang luas:

Sending Organization (SO) adalah lembaga atau organisasi pelatihan kerja yang memiliki izin resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merekrut, melatih, dan mengirimkan tenaga kerja atau peserta magang ke luar negeri.

2. Gaji dan tunjangan yang kompetitif:

Banyak pekerjaan di luar negeri menawarkan paket gaji dan tunjangan yang lebih kompetitif dari dalam negeri dengan jenis pekerjaan yang sama, yang mencakup fasilitas seperti asuransi kesehatan, tunjangan perumahan, dan bahkan pendidikan untuk anak-anak.

3. Pertumbuhan Pribadi:

Pengalaman hidup di luar negeri akan menjadi peluang mengembangkan diri, penyesuaian diri terhadap budaya baru dalam norma sosial, bahasa, ekonomi, hukum dan etika bisnis di luar negeri, serta peningkatan keterampilan interpersonal dalam menghadapi berbagai situasi baru.

4. Kontribusi terhadap Visi Indonesia Emas 2045:

Penempatan tenaga kerja terampil secara internasional merupakan bagian dari strategi nasional untuk memanfaatkan bonus demografi dan meningkatkan peran Indonesia dalam ekonomi global.



2.3.2. Peluang Jenis Pekerjaan di Luar Negeri

Permintaan PMI terus meningkat di berbagai negara, menciptakan peluang besar bagi lulusan SMK. Beberapa negara tujuan utama dengan kebutuhan tenaga kerja yang tinggi karena kepercayaan negara lain kepada PMI, seperti:

 <p>Jepang</p>	<p>Sektor Prioritas:Kesehatan (Perawat dan Perawat Lansia)</p> <p>Jurusan Linear:Kesehatan, Pekerjaan Sosial, Manufaktur Konstruksi, Kendaraan listrik, Mekatronika, Pemrograman Mesin Industri</p> <p>Keterangan: Faktor utama kebutuhan karena menurunnya angka angkatan kerja produktif</p>
 <p>Jerman</p>	<p>Sektor Prioritas: Kesehatan (Perawat)</p> <p>Jurusan Linear SMK: Kesehatan, Pekerjaan Sosial, Manufaktur Konstruksi, Kendaraan listrik, Teknologi Digital</p> <p>Keterangan: Faktor utama kebutuhan karena menjadi salah satu kiblat industri teknologi di dunia</p>
 <p>Timur Tengah (Arab Saudi, UEA, Qatar)</p>	<p>Sektor Prioritas: Hospitality</p> <p>Jurusan Linear SMK: Perhotelan, Pariwisata, Layanan Domestik</p> <p>Keterangan: Sebagai negara yang mengembangkan industri pariwisata dunia</p>
 <p>Kanada</p>	<p>Sektor Prioritas: Hospitality</p> <p>Jurusan Linear SMK: Kesehatan, Pekerjaan Sosial, Konstruksi, Teknologi digital, Pertanian, Perkebunan</p> <p>Keterangan: Temporary Foreign Worker Program (TFWP) dan Express Entry membuka jalur bagi tenaga kerja asing yang memiliki keterampilan khusus</p>
 <p>Eropa Timur (Polandia, Republik Ceko, Slovakia, Hungaria)</p>	<p>Sektor Prioritas: Manufaktur</p> <p>Jurusan Linear SMK: Pengelasan, Kendaraan Listrik, Mekatronika, Pemrograman Mesin Industri</p>

 <p>Korea Selatan</p>	<p>Sektor Prioritas: Manufaktur</p> <p>Jurusan Linear SMK: Manufaktur, Perkapalan, Pertanian, Kendaraan Listrik, Mekatronika, Pemrograman Mesin Industri</p>
 <p>Australia</p>	<p>Sektor Prioritas: Pertanian</p> <p>Jurusan Linear SMK: Manufaktur, Perkapalan, Pertanian, Kendaraan Listrik, Mekatronika, Pemrograman Mesin Industri</p>
 <p>Belanda</p>	<p>Sektor Prioritas: Kesehatan</p> <p>Jurusan Linear SMK: Kesehatan, Pekerjaan Sosial, Teknologi Digital</p>
 <p>Spanyol</p>	<p>Sektor Prioritas: Pariwisata</p> <p>Jurusan Linear SMK: Pariwisata, Perhotelan</p>
 <p>Italia</p>	<p>Sektor Prioritas: Pariwisata</p> <p>Jurusan Linear SMK: Pariwisata, Perhotelan</p>
 <p>Perancis</p>	<p>Sektor Prioritas: Pariwisata</p> <p>Jurusan Linear SMK: Pariwisata, Perhotelan, Teknologi Digital</p>
 <p>Selandia Baru</p>	<p>Sektor Prioritas: Pertanian</p> <p>Jurusan Linear SMK: Pertanian, Perkebunan</p>
 <p>Amerika Serikat</p>	<p>Sektor Prioritas: Teknologi Informasi</p> <p>Jurusan Linear SMK: Teknologi Digital</p>

Tabel 2.3 Peluang Kebekerjaan di Luar Negeri

Strategi Menghadapi Peluang dan Manfaat

1. Persiapkan Diri dengan Baik:

Melakukan literasi secara cermat tentang proses dan persyaratan menjadi pekerja, budaya, dan kondisi ekonomi negara tujuan.

2. Membangun Jaringan:

Berhubungan dengan komunitas lokal atau diaspora (WNI yang bekerja dan menetap di luar negeri) dan berinteraksi dengan rekan kerja setempat dapat membantu dalam membangun dukungan sosial.

3. Terus Tingkatkan Keterampilan:

Berinvestasi dalam pengembangan keterampilan dan peningkatan bahasa akan meningkatkan adaptasi dan kemungkinan kesuksesan di tempat kerja.

Selanjutnya satuan pendidikan SMK harus memberi pembekalan materi terkait peluang dan manfaat menjadi PMI kepada murid kelas 11 atau lebih awal lagi agar lebih membuka minat dan ketertarikan meningkatkan ekonomi dengan menjadi PMI.



Kompetensi dan Kualifikasi yang Dibutuhkan Pasar Luar Negeri

2.5.1. Kompetensi

1. Kompetensi Teknis

SMK harus memberi pembekalan calon lulusan dengan bukti kompetensi, seperti sertifikat kompetensi dari lembaga yang kredibel dan diakui oleh negara Indonesia dan/atau Internasional sesuai kebutuhan negara tujuan. Salah satunya cara memperoleh sertifikasi kompetensi teknis dapat melalui lembaga sertifikasi profesi (LSP). Beberapa keahlian dan keterampilan profesional sesuai bidang masing-masing, di antaranya:

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Keperawatan dan Caregiver | keterampilan merawat lansia dan pasien, teknik dasar keperawatan, pertolongan pertama. |
| • Manufaktur dan Teknik | penguasaan alat berat, otomasi industri, pengelasan, kelistrikan, dan kontrol kualitas. |
| • Perhotelan dan Tata Boga | pelayanan pelanggan, teknik memasak internasional, kebersihan dapur, dan pengelolaan restoran. |
| • Pertanian dan Peternakan | teknik budidaya, sistem pertanian modern, dan pemeliharaan ternak. |

Kompetensi ini dibuktikan dengan **sertifikasi nasional (BNSP)** atau **sertifikasi internasional** sesuai standar negara tujuan (misalnya: JFT-Basic Japan, CBQF Jerman, atau EPS-Test Korea).

2. Kompetensi Bahasa dan **Soft Skills**

Bahasa merupakan faktor yang sama pentingnya dengan kompetensi teknis bagi Pekerja Migran Indonesia. Kemampuan berbahasa asing dapat membantu dalam berkomunikasi, beradaptasi, dan meningkatkan kualitas hidup di negara tempat mereka bekerja, serta meningkatkan pemahaman mereka dalam konteks hak dan kewajiban bekerja. Beberapa sertifikasi Bahasa Asing yang dapat diambil sesuai

dengan negara tujuan penempatan:

- a. **Bahasa Jepang** (dengan minimal N4 untuk program SSW atau Magang)
- b. **Bahasa Korea** (TOPIK dan EPS-Test),
- c. **Bahasa Inggris** (Berupa TOEIC, TOEFL, ataupun IELTS)
- d. Bahasa Inggris/Mandarin pasif untuk program SP2T
- e. Disertai *soft skills* seperti disiplin, komunikasi, tanggung jawab, kerja tim, dan manajemen waktu.

Oleh karena itu, program penguatan akses kerja luar negeri di SMK perlu memasukkan pelatihan intensif bahasa asing dan pelatihan budaya kerja negara tujuan. PMI penting memahami budaya lokal negara tujuan karena hal itu penting untuk menjaga nama baik identitas bangsa Indonesia merupakan negara bermartabat dan memperkuat citra bangsa berbudaya yang bernilai positif. Memahami budaya negara penempatan juga membantu meningkatkan rasa cinta tanah air, toleransi, serta memperkaya pengetahuan tentang kekayaan budaya Indonesia.



2.5.2. Kualifikasi

persyaratan atau standar yang harus dipenuhi seseorang termasuk lulusan SMK untuk mengisi lowongan pekerjaan di negara tujuan sesuai dengan jabatan tersedia. Dokumen kualifikasi tertulis dibuktikan melalui pendidikan (ijazah), pelatihan (sertifikat), pengalaman kerja (surat pengalamankerja), kesehatan (surat keterangan dari dokter) atau sertifikasi formal (sertifikat uji kompetensi).

Skema Penempatan Untuk Bekerja Di Luar Negeri

Menurut Undang Undang nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar Negeri atau dikenal dengan Skema penempatan untuk bekerja ke luar negeri terdiri atas 4 (empat), yaitu melalui skema pemerintah (*Government to Government/G to G*); skema swasta dengan swasta (*Private to Private/P to P*), Skema Perseorangan, dan skema Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri (UKPS), adapun penjelasannya:

1. Skema Penempatan Pemerintah (**Government to Government** (G to G))

Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Pemerintah dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara Pemberi Kerja Pekerja Migran Indonesia (G to G) atau Pemberi Kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan (G to P). Contoh G to G yang populer adalah penempatan PMI ke Jepang, Korea, dan Jerman. Dalam skema G to G pihak satuan pendidikan SMK harus berkoodinasi dengan KP2MI/BP2MI atau BP3MI untuk mengetahui program dan negeri tujuan serta pembiayaan keberangkatan PMI.

2. Skema Kerja Sama Swasta dengan Swasta (**Private to Private**)

Skema P to P adalah penempatan PMI dilakukan oleh Perusahaan Penempatan PMI (P3MI) ke perusahaan di negara tujuan penempatan. Perusahaan penempatan berperan sebagai pihak yang mencari dan menyalurkan PMI ke perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Skema ini lebih fleksibel variatif dalam hal jenis pekerjaan dan negara tujuan, tetapi juga memerlukan kehati-hatian dalam memilih P3MI yang resmi, aman, dan terpercaya. Dalam skema P to P, pihak satuan pendidikan SMK harus berkoodinasi dengan P3MI untuk mengetahui program dan negara tujuan serta pembiayaan keberangkatan PMI.


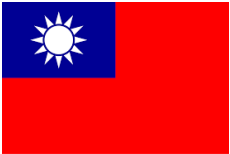
3. Skema Perseorangan

Skema penempatan ini dilakukan secara mandiri, Pekerja Migran Indonesia Perseorangan dapat bekerja ke luar negeri pada Pemberi Kerja berbadan hukum, dimana segala risiko ketenagakerjaan yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia Perseorangan, menjadi tanggung jawab sendiri. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan sebagaimana wajib melapor pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan

dan Perwakilan Republik Indonesia.

Sampai dengan pedoman ini diterbitkan, terdapat 2 (dua) program penempatan yang banyak diminati oleh Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang termasuk dalam skema penempatan Perseorangan, yakni *Specified Skilled Worker (SSW) Jepang/Tokuteigino* dan *Special Placement Program to Taiwan (SP2T)*

Sebagai gambaran, berikut perbandingan antara kedua program tersebut:

Kriteria	SSW Jepang	SP2T
Negara Tujuan	 Jepang	 Taiwan
Proses Penempatan	mendaftar melalui platform resmi seperti SIAPkerja (BP2MI) atau melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)	ditanggung oleh pelamar/kandidat
Jangka Waktu	Maksimal 5 tahun	Bervariasi tergantung dengan kontrak kerja
Peluang Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <i>Careworker Construction Industries Agriculture</i> <i>Building Cleaning Management</i> <i>Fishery and Aquaculture Machine Parts and Tooling Industries</i> <i>Automobile Repair and Maintenance Manufacture of Food and Beverages</i> <i>Industrial Machinery Industry Aviation Industry Shipbuilding and Ship Machinery Industry</i> <i>Food Service Industry Electric, Electronics, and Information Industries Accommodation Industry</i> 	<i>Nursing Home Manufacture (Operator)</i>

Tabel 2.4 Perbandingan Antara Program SSW dan SP2T

4. Skema Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri (UKPS)

Bentuk penempatan pekerja migran, di mana perusahaan menempatkan karyawannya di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri. Perusahaan wajib bertanggung jawab terhadap perlindungan pekerja yang ditempatkan ke luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri.



BAB 3

Strategi Penyiapan Lulusan SMK Untuk Akses Kebekerjaan Luar Negeri



Kesempatan kebhkerjaan di kerja luar negeri bagi lulusan SMK merupakan peluang strategis dalam mendorong peningkatan kompetensi, daya saing tenaga kerja, serta kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Untuk itu, diperlukan strategi satuan pendidikan SMK yang sistematis dan terintegrasi dengan pemerintah pusat atau daerah, mitra industri, dan lembaga pendukung lainnya. Strategi ini disusun berdasarkan kerangka kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) serta upaya link and match antara pendidikan vokasi dan kebutuhan pasar kerja global. Adapun strategis yang harus dilakukan oleh SMK antara lain:

Identifikasi Sektor Prioritas dan Negara Tujuan

SMK mengidentifikasi kompetensi dan sektor prioritas pekerja migran untuk memahami, mengidentifikasi dan menganalisis kompetensi esensial dan sektor-sektor prioritas yang dibutuhkan pada peluang keberkerjaan di Luar Negeri. Identifikasi sektor prioritas dan negara tujuan dapat diperoleh antara lain dari:

1. Laman resmi pemerintah seperti <https://siskop2mi.bp2mi.go.id/>;
2. Kementerian Luar Negeri;
3. KP2MI/BP2MI;
4. Direktorat SMK
5. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
6. Dinas Tenaga Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota;
7. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota;
8. Alumni yang sedang dan pernah berkerja di luar negeri
9. International Labour Organization (ILO), terkait kebutuhan keterampilan masa depan (*future skills*); dan
10. Literasi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan

Dengan melakukan identifikasi mampu memberikan arah bagi SMK dalam penyiapan dan penyelenggaraan pembelajaran maupun sertifikasi terkait kompetensi, bahasa, dan budaya negara yang akan dituju.

Dalam memfasilitasi itu semua, SMK dapat melakukan kegiatan:

1



Identifikasi sektor prioritas pekerjaan di luar negeri yang selaras dengan Bidang, Program dan Kompetensi keahlian di SMK. SMK dapat mengakses informasi terkait lapangan pekerjaan di luar negeri ke Kemendikdasmen, KP2MI, Kemnaker, Disdikprov, Disnaker, P3MI, dll.).

2



Pemetaan dari hasil identifikasi sektor prioritas pekerjaan luar negeri pada masing-masing Konsentrasi Keahlian yang diselenggarakan di SMK. SMK dapat memanfaatkan kelembagaan Bursa Kerja Khusus (BKK) dalam memetakan peluang kerja dengan Kompetensi Keahlian yang dimiliki

3



Sosialisasi peluang pekerjaan Luar Negeri hasil pemetaan kepada murid beserta orang tua murid/ masyarakat. Untuk menunjang informasi lebih mendalam, SMK dapat mengadakan pertemuan dengan orang tua murid serta dapat melibatkan Kemendikdasmen, KP2MI, Kemnaker, Disdikprov, Disnaker, dan P3MI.

Hasil dari proses identifikasi sektor dan negara tujuan ini harus menjadi referensi utama dalam:

1. Penyusunan perencanaan strategis sekolah (Renstra SMK)
2. Penetapan bidang keahlian prioritas di tingkat provinsi/kabupaten
3. Pembukaan program keahlian baru atau penyesuaian kurikulum berjalan (*existing*)
4. Pemetaan minat dan bakat murid terhadap sektor kerja luar negeri
5. Pengembangan kemitraan internasional yang spesifik berdasarkan sektor dan negara
6. Membentuk kelas khusus untuk murid yang berminat bekerja di luar negeri

Integrasi Kurikulum Berbasis Kebutuhan Luar Negeri

Integrasi kurikulum berbasis kebutuhan kompetensi kebidkerjaan luar negeri adalah sinkronisasi kurikulum yang telah tersusun bersama dunia kerja dalam negeri berdasarkan kompetensi kebidkerjaan luar negeri dengan harapan kompetensi kebidkerjaan luar negeri dapat diintegrasikan dalam penyiapan pendidikan dan pelatihan (diklat) kompetensi bagi murid yang akan bekerja ke luar negeri dan mengeliminir kompetensi yang tidak diperlukan untuk kebidkerjaan ke luar negeri.

Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum harus mengacu pada peta kebutuhan sektor kerja negara tujuan, yang diturunkan dari analisis tren ketenagakerjaan, permintaan kompetensi, dan profil jabatan di negara tujuan. Dengan demikian fokus pada luaran dan hasil pembelajaran (*learning outcomes*) murid mampu menunjukkan kompetensi teknis, perilaku kerja, dan keterampilan adaptif (bahasa, budaya, dan teknologi). Bentuk integrasi kurikulum dilakukan dengan pentahapan sebagai berikut:

1



Identifikasi dan integrasi kompetensi kebidkerjaan luar negeri hasil pemetaan yang belum masuk dalam kurikulum khusus penyiapan kebidkerjaan luar negeri.

2



Identifikasi dan eliminasi kompetensi yang tidak mendukung kebidkerjaan luar negeri.

3



Penetapan kurikulum khusus penyiapan kebidkerjaan ke luar negeri sesuai negara tujuan.

4



Menyiapkan kelas industri bagi SMK yang sudah memiliki kerja sama dengan Mitra Industri di luar negeri.

Pengembangan Kurikulum Berbasis Kebekerjaan Luar Negeri

Dalam mengembangkan kurikulum berbasis kebhkerjaan luar negeri, SMK perlu mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi pada pasal 7 ayat (2) tentang Standar Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud berupa Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia; Standar Kompetensi Kerja internasional; dan/atau Standar Kompetensi Kerja khusus.

Berikut langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan SMK dalam mengembangkan kurikulum berbasis kebhkerjaan luar negeri:

1. Analisa kurikulum yang digunakan SMK
2. Analisa elemen kompetensi yang dibutuhkan untuk bekerja di luar negeri
3. Sinkronisasi kurikulum yang digunakan SMK dengan elemen kompetensi yang dibutuhkan untuk bekerja di luar negeri
4. Implementasi kurikulum hasil sinkronisasi
5. pengujian hasil sinkronisasi

Setelah proses identifikasi dan analisa kurikulum dilaksanakan oleh SMK, pastikan juga bahwa kurikulum yang dikembangkan harus selaras dengan standar kompetensi kebhkerjaan luar negeri agar kompetensi lulusannya dapat diakui di negara tujuan penempatan. Berikut beberapa contoh Standar Kompetensi Internasional yang dibutuhkan berdasarkan negara tujuan penempatan:

- *Japan Foundation Standard (JFT- Basic)*
- Kompetensi SSW (*Specified Skilled Worker*) Jepang
- EQF (*European Qualification Framework*)
- SKKNI dan skema sertifikasi BNSP yang diakui lintas negara
- CGFNS (*Commission on Graduates of Foreign Nursing Schools*)
- ISCO-08 (*International Standard Classification of Occupations*)
- ANZSCO (*Australian and New Zealand Standard Classification of Occupations*)
- Dan lain sebagainya

Implementasi Integrasi Kurikulum

1. Penyusunan Dokumen Pembelajaran dan Materi Bahan Ajar

Setelah pemetaan kualifikasi kerja luar negeri, SMK dapat menyusun dokumen pembelajaran berdasarkan elemen kompetensi kualifikasi kerja luar negeri tersebut. Penyusunan tersebut melibatkan mitra SMK yang memahami terkait kualifikasi kerja di luar negeri. Selanjutnya, SMK mengimplementasikan dokumen pembelajaran yang telah disusun kepada murid yang memiliki minat untuk bekerja di luar negeri. SMK dapat melibatkan industri, P3MI, KP2MI/BP2MI, LKP, dan lain sebagainya dalam sinkronisasi dan penyusunan kurikulum yang aplikatif dan relevan dengan kebutuhan kebhkerjaan luar negeri.

2. Penyiapan Sumber Daya Manusia di SMK

Untuk mendukung pembelajaran berbasis kebutuhan kebhkerjaan luar negeri, SMK dapat bekerja sama dengan industri, LKP, dan lain sebagainya dalam menyiapkan guru yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kurikulum yang sudah disusun bersama.

3. Penguatan Kemampuan Non-Teknis

Setiap SMK dapat menambahkan mata pelajaran **Bahasa Asing Non-Bahasa Inggris** yang berorientasi pada kebhkerjaan luar negeri. Contohnya, sekolah dapat memilih Bahasa Jerman atau Bahasa Jepang sebagai mata pelajaran tambahan untuk memperkuat persiapan kebhkerjaan ke luar negeri, khususnya pada murid yang memiliki peminatan ke Jerman atau Jepang. Dalam pembelajaran Bahasa Asing Non-Bahasa Inggris dapat diperkuat dengan konten budaya kerja di negara tujuan.

Skema Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Internasional

Skema pelatihan dan sertifikasi kompetensi internasional merupakan salah satu elemen kunci dalam menyiapkan lulusan SMK yang siap kerja di luar negeri secara profesional. SMK menyiapkan alur sistematis mulai dari penyusunan kurikulum khusus, pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja global, hingga uji sertifikasi nasional maupun internasional yang diakui oleh negara tujuan. Penyusunan skema ini harus mengacu pada peta sektor prioritas dan negara tujuan, sebagaimana disajikan dalam bagian sebelumnya. Adapun komponen dapat disiapkan dalam alur kebekerjaan luar negeri meliputi:

1. Kurikulum khusus kebekerjaan luar Negeri

Setelah pemetaan kualifikasi kerja luar negeri, SMK dapat menyusun dokumen pembelajaran berdasarkan elemen kompetensi kualifikasi kerja luar negeri tersebut. Penyusunan tersebut melibatkan mitra SMK yang memahami terkait kualifikasi kerja di luar negeri. Selanjutnya, SMK mengimplementasikan dokumen pembelajaran yang telah disusun kepada murid yang memiliki minat untuk bekerja di luar negeri. SMK dapat melibatkan industri, P3MI, KP2MI/BP2MI, LKP, dan lain sebagainya dalam sinkronisasi dan penyusunan kurikulum yang aplikatif dan relevan dengan kebutuhan kebekerjaan luar negeri.

2. Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi

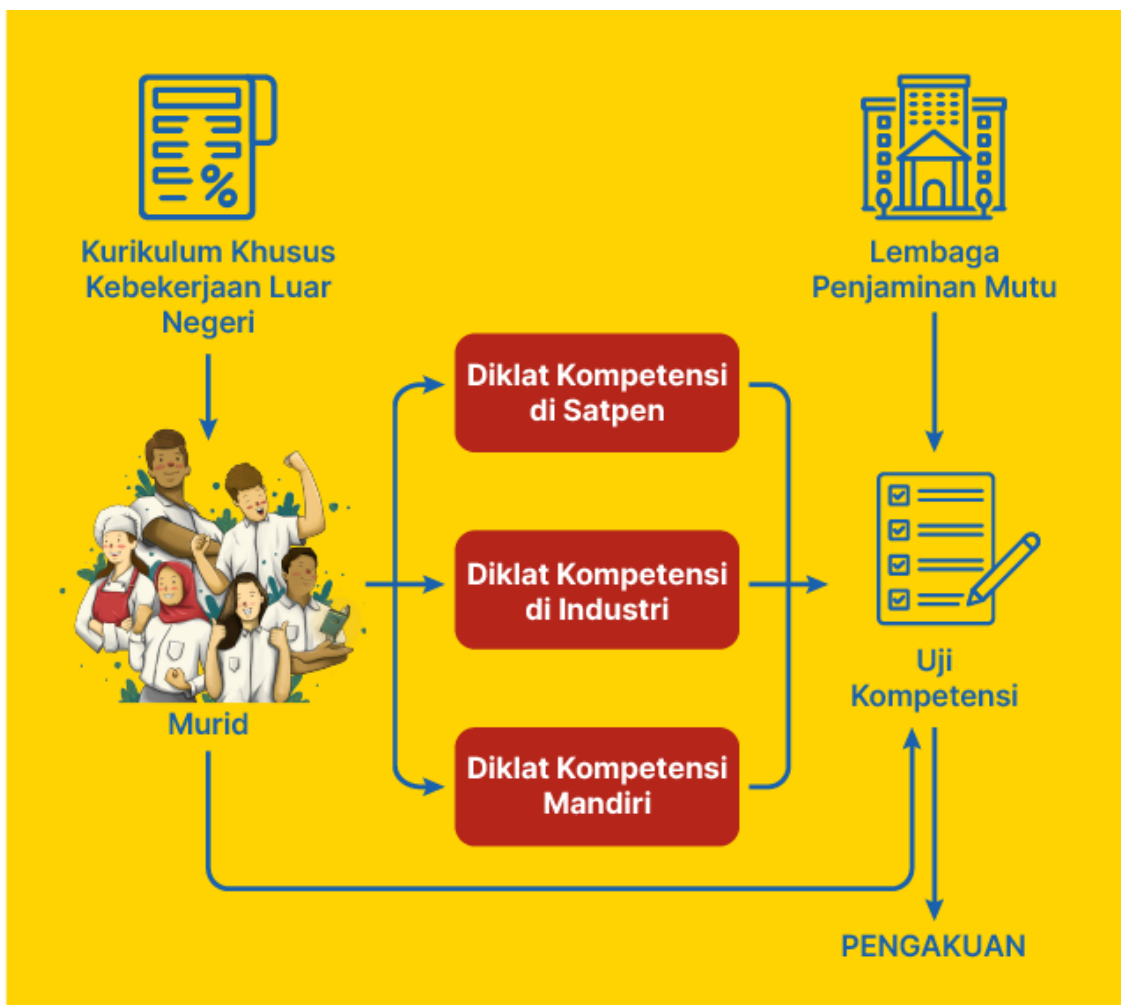
Peserta difokuskan pada murid kelas akhir (kelas XII) dan murid dengan peminatan kebekerjaan luar negeri di kelas sebelum XII. Seleksi awal perlu mempertimbangkan minat, kesiapan, dan rekam jejak akademik, disertai asesmen awal potensi.

3. Penyelenggaraan Diklat kompetensi di satuan Pendidikan, di Industri dan diklat mandiri

- a. **Di satuan pendidikan:** Pelatihan dasar kompetensi vokasi dan bahasa asing (English, Japanese, Korean, German) berbasis *blended learning*,
- b. **Di dunia usaha dan industri (DUDI):** Pelatihan lanjut berbasis proyek (*project-based learning*), magang industri, atau praktik kerja luar negeri (PKLN).
- c. **Diklat mandiri:** Dikelola bersama P3MI dengan modul pelatihan bersertifikat sesuai skema penempatan

- d. **Kolaborasi dengan KP2MI/ BP2MI:** program peningkatan kapasitas PMI sesuai dengan kebutuhan/ kualifikasi Negara tujuan penempatan
4. Lembaga penjaminan mutu/ Lembaga sertifikasi nasional/Internasional.
 - a. **LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi)** dari BNSP untuk uji kompetensi nasional dan sektor spesifik,
 - b. **Lembaga Internasional:** Seperti Japan Foundation untuk ujian JFT-Basic, TOPIK untuk Korea, Goethe Institut untuk Jerman,
 - c. **Industri Mitra:** Sertifikasi yang dikeluarkan langsung oleh perusahaan mitra luar negeri sebagai syarat penerimaan kerja, dan
 - d. **KP2MI/ BP2MI:** memfasilitasi rekognisi sertifikasi internasional
 5. Contoh penyelenggara uji kompetensi bahasa asing untuk negara yang dituju, antara lain:
 - a. **Jepang:** JFT-Basic, JLPT N4
 - b. **Korea:** EPS-TOPIK
 - c. **Jerman:** A2/B1
 - d. **Inggris/UEA:** TOEIC/IELTS
 6. Dokumen sertifikasi menjadi syarat administratif penempatan PMI, beberapa bentuk sertifikasi uji kompetensi yang dapat diakui:
 - a. **Nasional:** Melalui BNSP dan Kemendiknas
 - b. **Internasional:** Oleh pemerintah atau lembaga resmi negara tujuan (seperti IMM Japan, HRD Korea, Kavalai Jerman, atau employer list).





Gambar 3.1. Flowchart Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Internasional

Penguatan Soft Skill, Literasi Bahasa Asing, dan Adaptasi Budaya Negara Tujuan

Penguatan *soft skill*, bahasa asing, dan budaya negara tujuan merupakan Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di satuan Pendidikan SMK yang diintegrasikan pada pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler bagi murid yang peminatannya akan bekerja ke luar negeri. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

1. Satuan Pendidikan menganalisis dan mengelompokkan murid ke pekerjaan luar negeri dalam kelompok berbasis negara tujuan;
2. Satuan Pendidikan mengintegrasikan kebutuhan pelatihan *soft skill*, bahasa asing, dan budaya negara tujuan yang dituangkan dalam kurikulum khusus ke pekerjaan ke luar negeri;
3. Satuan Pendidikan memberikan layanan diklat kurikulum khusus kepada kelompok peminatan ke pekerjaan luar negeri berbasis negara tujuan

3.6.1. Penguatan Soft Skill

SMK melakukan diskusi interaksi dalam pembelajaran bagi murid yang memiliki keminatan menjadi PMI terkait Norma, sopan santun, jam kerja, dan kebiasaan bersosialisasi adalah berbagai aturan dan perilaku yang mengatur kehidupan bermasyarakat lokal di negara tujuan.



Norma adalah aturan yang lebih umum dan luas, mencakup norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Sopan santun adalah bagian dari norma kesopanan, yang lebih spesifik pada perilaku menghormati dan menghargai orang lain dalam pergaulan. Jam kerja adalah aturan tentang waktu bekerja yang ditetapkan oleh perusahaan atau instansi. Kebiasaan bersosialisasi merujuk pada cara-cara individu berinteraksi dan bergaul dalam masyarakat, yang bisa berbeda-beda antar kelompok sosial di negara tujuan

3.6.2. Penguatan Literasi Bahasa

Penguatan literasi bahasa di negara tujuan merujuk pada upaya untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman berbahasa dan sastra di negara tujuan. Memperkaya Kosakata, media buku cerita, permainan kata, atau aplikasi edukasi dapat membantu siswa memperkaya kosakata

negara tujuan.

Pembelajaran Kontekstual dan situasional menjadi media eksperimen memungkinkan murid memahami bahasa negara tujuan dalam kehidupan sehari-hari. Murid dapat mengidentifikasi bagaimana bahasa digunakan dalam situasi nyata, seperti cerita atau percakapan.

Integrasi Teknologi, dengan perkembangan teknologi, aplikasi edukasi dan alat digital lainnya membantu siswa berinteraksi dengan bahasa negara tujuan menggunakan perangkat yang murid sukai. Ini juga mempersiapkan murid untuk penggunaan teknologi dalam literasi di masa depan

3.6.3. Adaptasi Budaya

Satuan pendidikan SMK harus melakukan *Cultural Briefing* /arahan budaya yang menjelaskan singkat mengenai budaya suatu tempat atau kelompok tertentu di negara tujuan. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman dan apresiasi terhadap adat istiadat, praktik, bias budaya, dan asumsi-asumsi yang berlaku di tempat negara tujuan.

Arahan budaya menjadi alat pengenalan dan pelatihan tentang persamaan dan perbedaan budaya yang ada untuk membantu murid calon PMI yang akan bekerja atau tinggal di lingkungan budaya baru. Tujuannya adalah untuk meminimalkan potensi konflik, meningkatkan adaptasi, dan membangun hubungan yang harmonis. Selain itu Satuan pendidikan SMK juga harus memberikan pengalaman, baik keberhasilan maupun kegagalan, agar menjadi guru terbaik murid yang memberikan pelajaran berharga untuk pertumbuhan pribadi dan peningkatan kualitas hidup di tempat kerja luar negeri.

Satuan pendidikan SMK harus memberikan kepada murid terkait contoh kejadian-kejadian yang pernah terjadi agar menjadi membantu murid untuk memperbaiki diri, menghindari kesalahan yang sama, dan membuat keputusan yang lebih baik di masa depan saat bekerja di luar negeri.



Sebagai contoh positif yang mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari negara korea selatan Sugianto sebagai PMI menunjukkan aksi heroik dengan menyelamatkan warga dan lansia saat kebakaran hutan di Kawasan Uiseong-gun, Gyeongbuk pada 22 Maret 2024.

Aksi ini dilakukan karena kepedulian kemanusiaan Sugianto yang tinggi dengan bergerak cepat memperingatkan warga, bahkan menggendong seorang lansia sejauh 300 meter ke tempat aman. Aksi heroik ini mendapatkan pujian dari berbagai pihak, termasuk Menteri P2MI dan pemerintah Korsel.



Sebagai contoh negatif yang harus dihindari bahwa pada agustus 2024 Tenaga Kerja Migran Indonesia (PMI) di Jepang telah membentuk "geng WNI" di Osaka dan menimbulkan keresahan di kalangan warga setempat karena mengganggu ketertiban, membuang sampah sembarangan, dan memblokir jalan.

Sekelompok PMI juga membawa-bawa senjata tajam sambil menaiki sepeda dengan membawa bendera komunitasnya untuk menakuti orang-orang.
dokumentasi: threads.com/inifipop.id

Kemitraan SMK dengan P3MI

P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) adalah mitra penempatan PMI swasta karena merupakan badan usaha berizin yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada pengguna swasta di luar negeri dan juga P3MI menjalin perjanjian kerja sama dengan mitra usaha atau pemberi kerja di luar negeri. Perjanjian ini memuat hak dan kewajiban para pihak dan biasanya menghasilkan *Job Order* atau *Demand Letter*, yaitu permintaan resmi untuk tenaga kerja. Dengan didasari *Job Order* dari perusahaan di negara penempatan P3MI dapat mengidentifikasi kebutuhan kompetensi, maka SMK sebaiknya melakukan kerjasama dengan P3MI.

Kemitraan antara SMK dengan P3MI menjadi salah satu upaya untuk menyelaraskan kurikulum SMK dengan kebutuhan pasar kerja luar agar lulusan SMK lebih siap kerja keluar negeri. Selain itu SMK akan mendapatkan informasi peluang kerja di luar negeri dan mendapatkan pelayanan dan pendampingan selama proses penempatan, termasuk sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri. Apabila ada timbul selama penempatan pekerja migran akan mendapatkan advokasi penyelesaian permasalahan sampai kepastian keberangkatan dan kepulangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Skema Model Sistemik atau Skema Integratif Untuk SMK 4 Tahun + P3MI

MODEL PENGEMBANGAN SMK 4 TAHUN

Kelas 10	Kelas 11	Kelas 12 (Layanan Berbasis Peminatan BMW)			Kelas 13
Penguatan mata pelajaran umum dan dasar kejuruan	Pembelajaran berbasis kompetensi dan sertifikasi	B-DN	CBT & Sertifikasi dan Teaching Factory	PKL 6 Bulan	PKL 10 bulan dan sertifikasi kompetensi
		B-LN	CBT & sertifikasi Bahasa Asing Peminatan Luar Negeri	PKL 6 Bulan	Mapel Penyiapan Kerja ke Luar Negeri oleh sekolah/Kerjasama dengan LKP : 1. Kompetensi teknis sesuai permintaan Industri LN & sertifikasi 2. Penguatan Bahasa asing negara yang dituju & sertifikasi 3. Karakter Cinta tanah Air & budaya negara yg negara dituju
		M	CBT & sertifikasi, dan Teaching Factory	PKL 3 Bulan dan penguatan riset	PKL 6 bulan, penguatan tefa dan riset terapan
	Pemetaan/ pendataan peminatan bekerja, melanjutkan dan wirausaha	W	CBT & sertifikasi dan kelas wirausaha	PKL 3 Bulan dan penguatan riset	PKL 6 bulan, dilanjut pengembangan kelas wirausaha
TAHUN I	TAHUN II	TAHUN III			TAHUN IV

Tabel 3.1. Model Pengembangan SMK 4 Tahun Terintegrasi Kebekerjaan Luar Negeri

Penjelasan

1. B-DN (Bekerja Dalam Negeri), B-LN (Bekerja Luar Negeri), M (Melanjutkan), W (Wirausaha).
2. Pada tahun ke 4 bagi siswa yang akan bekerja di Luar negeri (kelompok Peminatan B-LN), difasilitasi pembelajaran kompetensi teknis sesuai negara tujuan, budaya dan Bahasa asing negara tujuan.
3. Satuan Pendidikan program 4 tahun wajib mengusulkan program peminatan ke luar negeri yang sudah dilengkapi perjanjian Kerjasama dengan Industri negara tujuan.
4. Penetapan peminatan ke luar negeri tahun dibatasi dalam jangka waktu tertentu sesuai permintaan Industri di Luar Negeri (2-5 tahun), dan dapat mengembangkan peminatan lebih dari satu negara tujuan.

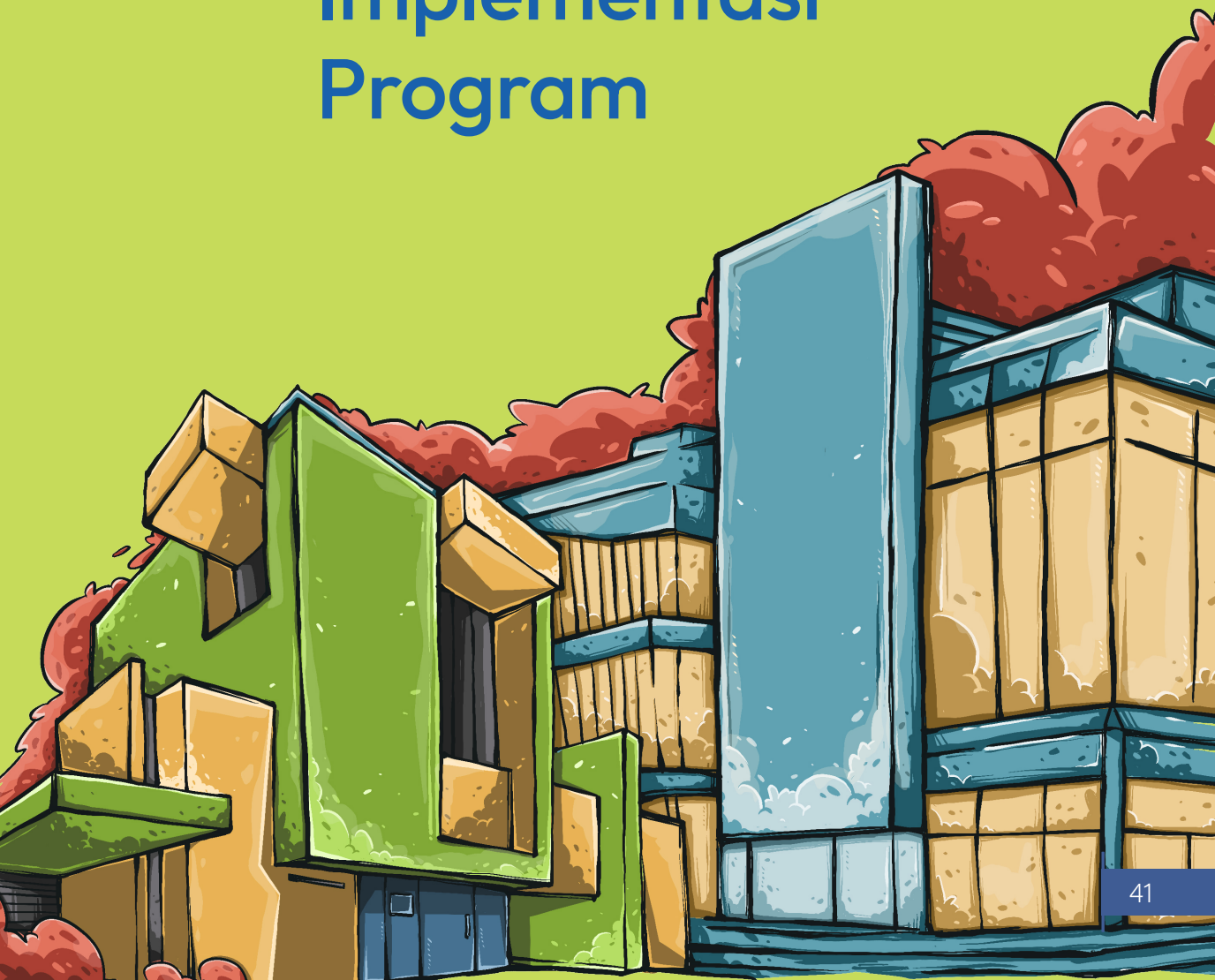
SELEKSI, DIKLAT, DAN SERTIFIKASI KEBEKERJAAN LN



Gambar 3.2. Flowchart Seleksi, Diklat dan Sertifikasi Kebekerjaan Luar Negeri

BAB 4

Tata Kelola, Koordinasi, dan Mekanisme Implementasi Program



Dalam pelaksanaan program kebekerjaan luar negeri untuk lulusan SMK, membutuhkan Tata kelola, koordinasi lintas instansi, dan mekanisme implementasi. Ketiga hal tersebut penting dalam menjalankannya, terutama dalam konteks pemerintahan. Tata kelola (*governance*) mengacu pada cara tatanan pelaksanaan program organisasi pemerintahan atau entitas dikelola dan diarahkan, termasuk pengambilan keputusan, pemantauan, dan pengendalian.

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi/Kabupaten/Kota

1. Pendataan dan Pemetaan

Melakukan pendataan potensi tenaga kerja terampil di daerah, khususnya lulusan SMK bersama dengan Bursa Kerja Khusus.

2. Penyelenggaraan Bursa Kerja

Mengadakan bursa kerja (*job fair*) di tingkat lokal/provinsi yang melibatkan P3MI dan perwakilan industri yang menyediakan lowongan pekerjaan di luar negeri.

3. Verifikasi Dokumen

Membantu dalam proses verifikasi dokumen calon pekerja di tingkat daerah.

4. Pengawasan Lokal

Melakukan pengawasan terhadap agen penempatan yang beroperasi di wilayahnya untuk mencegah praktik ilegal dan penipuan.

5. Pelatihan Pra-Penempatan

Menyelenggarakan atau memfasilitasi pelatihan keterampilan dan bahasa bagi calon PMI di tingkat daerah.

Dinas Pendidikan Provinsi (Disdikprov)

1. Pembinaan dan Pengawasan SMK

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kurikulum dan program di SMK, termasuk yang terkait dengan kurikulum kesiapan kerja di luar negeri.

2. Koordinasi dengan Industri Lokal

Mendorong SMK di wilayah binaannya untuk berkolaborasi dengan industri lokal yang memiliki jaringan internasional.

3. Pengembangan Ekosistem Vokasi

Mendukung pengembangan ekosistem vokasi di tingkat provinsi yang melibatkan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) untuk penyerapan lulusan SMK.

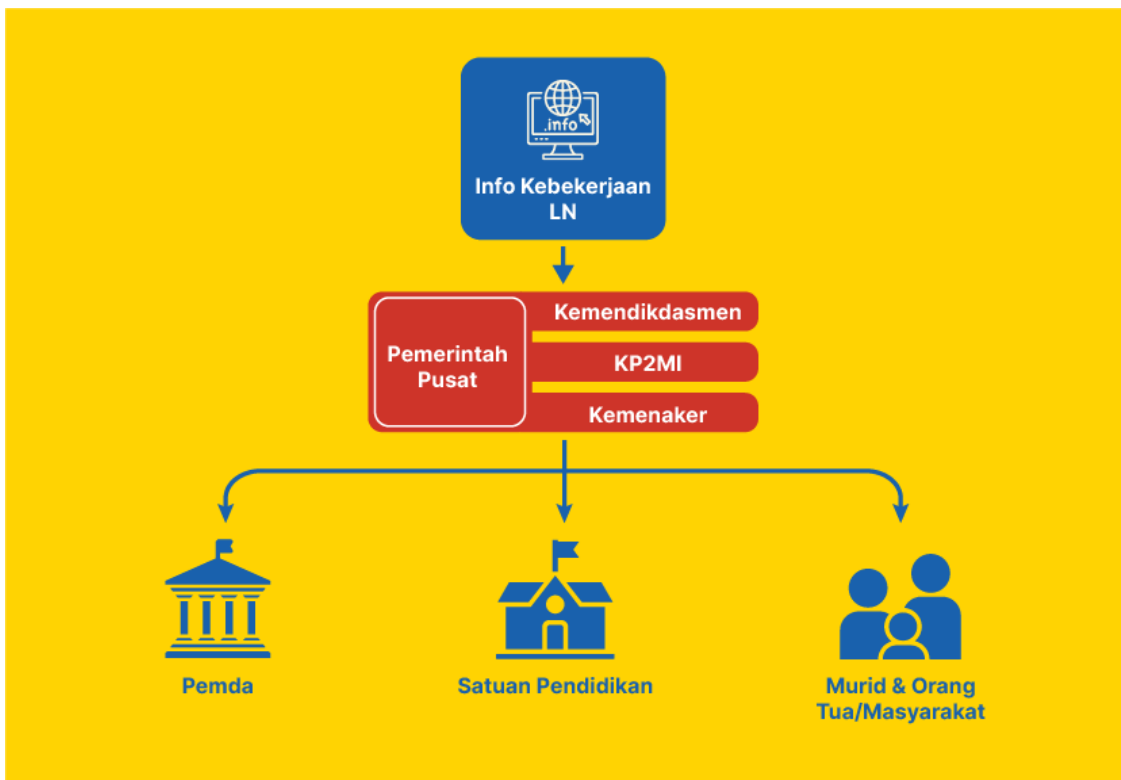
4. Penyaluran Informasi

Meneruskan informasi dan kebijakan dari Kemendikdasmen serta KP2MI kepada SMK di bawah binaannya.

Dengan kolaborasi yang terkoordinasi lintas dinas pemerintah daerah dengan pemerintah pusat diharapkan akses ke pekerjaan luar negeri bagi lulusan SMK dapat diperluas secara signifikan, sekaligus memastikan bahwa penempatan dilakukan secara aman, legal, dan bermartabat.

Mekanisme Sosialisasi Program Kepada Murid dan Orang Tua

Sosialisasi program peningkatan akses ke pekerjaan luar negeri perlu dilakukan secara berjenjang dan komprehensif untuk memastikan informasi yang akurat dan lengkap sampai kepada calon pekerja migran dan keluarganya. Mekanisme ini melibatkan beberapa lapisan pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, murid, instansi terkait dan orangtua.



Gambar 4.1. Flowchart Mekanisme Sosialisasi Program Kebekerjaan di Luar Negeri

4.3.1. Sosialisasi dari KP2MI/BP2MI dan Kemendikdasmen kepada Disdikprov, Disnaker, dan SMK

1. Penyusunan Pedoman dan Materi Sosialisasi

KP2MI dan Kemendikdasmen bekerja sama menyusun pedoman, panduan, dan materi sosialisasi yang standar, mencakup peluang kerja, prosedur, persyaratan, hak dan kewajiban, serta risiko dan pencegahan penipuan. Materi ini bisa berupa presentasi, brosur, infografis, atau video.

2. Webinar/Workshop/Bimbingan Teknis (Bimtek) Tingkat Nasional/Regional

KP2MI dan Kemendikdasmen menyelenggarakan kegiatan secara berkala bagi unsur Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Tenaga Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unsur SMK seperti Kepala Sekolah, Guru Bimbingan Konseling (BK), dan Ketua Bursa Kerja Khusus (BKK).

Dalam kegiatan ini, dijelaskan secara detail program kerja ke luar negeri, peluang di sektor-sektor tertentu, kebijakan terbaru, serta bagaimana menyalurkan informasi ini secara efektif ke tingkat bawah.

3. Distribusi Informasi dan Data

Informasi terkini mengenai data lowongan kerja resmi, daftar P3MI yang resmi, serta perkembangan perjanjian bilateral dengan negara tujuan didistribusikan secara rutin kepada Disdikprov, Disnaker, dan SMK melalui portal resmi dan surat edaran.

4. Pembentukan Tim Koordinasi

Pembentukan tim koordinasi di tingkat pusat yang melibatkan KP2MI/BP2MI dan Kemendikasmen untuk memastikan alur informasi dan dukungan teknis berjalan lancar ke daerah.

4.3.2 Sosialisasi dari SMK kepada Murid dan Orang Tua

SMK sebagai garda terdepan memiliki peran vital dalam menyosialisasikan program ini langsung kepada murid dan orang tua, dengan dukungan dari Disdikprov dan Disnaker, kegiatan yang dapat dilakukan di antaranya

1. Melakukan pertemuan dengan orangtua murid terkait peluang kekerjaan di luar negeri pada saat penerimaan murid baru dan kenaikan kelas;
2. Berbagi cerita dan pengalaman dari keberhasilan alumni yang bekerja di luar negeri;
3. Sosialisasi program kekerjaan luar negeri dengan menggandeng Kemendikdasmen, Kementerian Luar Negeri, KP2MI/BP2MI, Dinas Pendidikan dan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi/Kabupaten/Kota;
4. Mengadopsi *best practice* dari SMK lain yang sudah berhasil melakukan penyaluran lulusannya bekerja di luar negeri;
5. Membuat poster program kekerjaan luar negeri.

Untuk mengoptimalkan sosialisasi SMK dapat menggunakan strategi melibatkan beberapa unit di sekolah antara lain:

1. Bursa Kerja Khusus di SMK

Ketua beserta Tim BKK SMK secara aktif memberikan sesi bimbingan kepada murid mengenai pilihan karir di luar negeri, potensi keahlian yang diminati, serta jalur yang aman dan legal. Sesi ini bisa dilakukan secara individu atau kelompok.

2. Kegiatan Sosialisasi Terbuka Komite Sekolah di Sekolah

- a. SMK mengadakan forum sosialisasi bersama komite sekolah yang mengundang murid dan orang tua/wali. Dalam forum ini, SMK dapat:
- b. Menyajikan materi yang diterima dari KP2MI/BP2MI dan Kemendiknasmen.
- c. Mengundang Dinas Pendidikan dan/atau Dinas Ketenagakerjaan setempat untuk menjelaskan peluang dan prosedur kerja di luar negeri.
- d. Mengundang KP2MI/BP2MI atau P3MI resmi yang terdaftar untuk memaparkan lowongan dan proses penempatan.
- e. Mengundang alumni SMK yang sukses bekerja di luar negeri untuk berbagi pengalaman langsung.
- f. Menyediakan sesi tanya jawab interaktif untuk menjawab kekhawatiran dan pertanyaan dari murid dan orang tua.

3. Penyediaan Pusat Informasi Sekolah

SMK dapat mendirikan papan informasi atau pojok karir yang berisi brosur, poster, dan materi digital tentang program kerja ke luar negeri, kontak penting, dan tautan ke situs resmi KP2MI/BP2MI atau Kemendiknasmen.

4. Penggunaan Media Komunikasi Sekolah

Informasi penting disebarkan melalui grup komunikasi orang tua (*WhatsApp, Telegram*), surat edaran, atau platform digital sekolah (*website, media sosial*) untuk memastikan semua pihak terinformasi.

5. Materi Edukasi Interaktif

Mengembangkan materi edukasi yang mudah dipahami seperti video pendek, komik digital, atau simulasi wawancara kerja yang dapat diakses oleh murid dan orang tua.

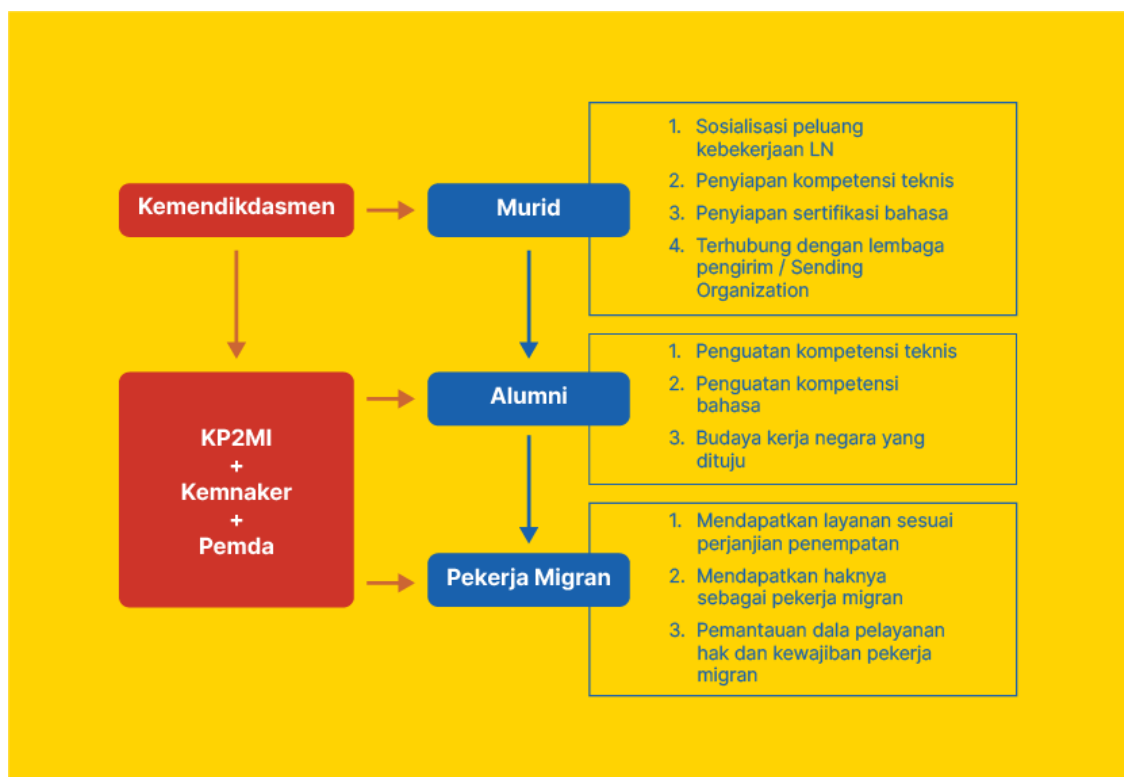
6. Kunjungan Industri/Webinar dengan Industri

Jika memungkinkan, SMK dapat mengatur kunjungan virtual atau fisik ke perusahaan yang memiliki program rekrutmen internasional, atau mengadakan webinar dengan HRD perusahaan di luar negeri untuk memberikan gambaran nyata.

Dengan mekanisme sosialisasi yang terstruktur dan masif ini, diharapkan murid SMK dan orang tua mereka memiliki pemahaman yang komprehensif, sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat dan menghindari jebakan penipuan saat ingin bekerja di luar negeri.

Skema Pendampingan dan Pembinaan Berjenjang

Untuk memastikan kelancaran dan keamanan proses penempatan kerja ke luar negeri bagi lulusan SMK, diperlukan skema pendampingan dan pembinaan yang terintegrasi dan berjenjang. Skema ini melibatkan koordinasi aktif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan (SMK), hingga agen penempatan (P3MI) dan keluarga.



Gambar 4.2. Flowchart Mekanisme Sosialisasi Program Kebekerjaan di Luar Negeri

4.4.1 Tingkat Pusat (KP2MI/BP2MI, Kemendikdasmen, Kemnaker, dan Kemlu)

1. Penyusunan Pedoman dan SOP

Kementerian/Lembaga di tingkat pusat menyusun pedoman operasional standar (SOP) dan prosedur kerja yang jelas untuk seluruh tahapan penempatan, mulai dari pendaftaran, pelatihan, keberangkatan, hingga kepulangan.

2. Program Pelatihan Instruktur dan Konselor

Mengadakan pelatihan bagi guru BK SMK, BKK SMK, Disnaker, dan P3MI tentang prosedur penempatan, perlindungan PMI, serta isu-isu ketenagakerjaan global.

3. Sistem Informasi Terpadu

interoperabilitas dengan sistem informasi yang terkait (misalnya <https://siskop2mi.bp2mi.go.id/>)

4. Jalur Pengaduan dan Bantuan Hukum

Menetapkan jalur pengaduan resmi dan menyediakan bantuan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia yang menghadapi masalah di negara penempatan melalui perwakilan RI di luar negeri seperti Layanan Pengaduan KP2MI melalui telepon: 08001000, faksimili: 021 29244810, telepon dari luar negeri: 6221 29244800, surel: halotki@bp2mi.go.id dan portal resmi https://aim.bp2mi.go.id/pengaduan/info_adu dan <https://peduliwni.kemlu.go.id/beranda.html>

4.4.2 Tingkat Daerah (Disdikprov, Disnaker Provinsi/Kabupaten/Kota)

1. Pembinaan dan Monitoring SMK

Dinas Pendidikan Provinsi secara berkala memonitor dan membina SMK terkait implementasi kurikulum, program persiapan kerja luar negeri, dan kepatuhan terhadap pedoman yang ditetapkan pusat.

2. Verifikasi dan Validasi

Dinas Tenaga Kerja berkoordinasi dengan KP2MI untuk melakukan verifikasi awal terhadap calon Pekerja Migran Indonesia dan P3MI yang beroperasi di wilayahnya.

3. Pusat Informasi dan Layanan Daerah

Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) atau dinas terkait di wilayahnya sebagai pusat informasi, konsultasi, dan fasilitasi awal bagi calon Pekerja Migran Indonesia di tingkat daerah.

4. Program Pembekalan Akhir

Menyelenggarakan pembekalan akhir bagi calon PMI sebelum keberangkatan, yang mencakup informasi detail negara tujuan, budaya kerja, hak-hak, dan kontak darurat.

4.4.3 Tingkat Satuan Pendidikan (SMK)

1. Pendampingan Karir dan Akademik

Guru BK, BKK, dan wali kelas memberikan pendampingan intensif kepada murid yang berminat kerja di luar negeri, membantu dalam pemilihan jurusan yang sesuai, persiapan dokumen, dan peningkatan kompetensi (bahasa dan teknis).

2. Pelatihan Pra-Keberangkatan (***Pre-Departure Training***)

SMK berkolaborasi dengan P3MI resmi atau lembaga pelatihan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pelatihan yang spesifik sesuai kebutuhan negara tujuan dan profesi, termasuk pengenalan budaya, hukum, dan etika kerja.

3. Jejaring Alumni

Membangun dan mengaktifkan jejaring alumni yang telah bekerja di luar negeri sebagai mentor dan sumber informasi bagi murid yang akan berangkat.

4. Komunikasi dengan Orang Tua

Menjaga komunikasi yang terbuka dengan orang tua/wali murid mengenai seluruh tahapan proses penempatan, termasuk risiko dan manfaatnya.

4.4.4 Peran Mitra Kerja (P3MI) dan Keluarga

1. P3MI

Bertanggung jawab penuh atas proses penempatan yang sesuai prosedur, mulai dari rekrutmen, pelatihan, pengurusan dokumen, keberangkatan, hingga penempatan dan perlindungan di negara tujuan. Mereka juga harus menyediakan saluran komunikasi darurat bagi PMI.

2. Keluarga

Diberikan pemahaman yang cukup mengenai prosedur, risiko, dan hak- hak PMI. Keluarga diharapkan dapat menjadi pendukung moral dan menjadi saluran informasi pertama jika ada masalah yang dihadapi PMI di luar negeri, sebelum meneruskan ke pihak berwenang.

Skema berjenjang ini memastikan bahwa setiap tahapan perjalanan lulusan SMK menuju kerja di luar negeri didukung oleh sistem yang kuat, mulai dari pembinaan kompetensi, sosialisasi informasi yang akurat, hingga perlindungan hukum dan pendampingan di negara tujuan.

Penguatan Literasi Regulasi Terkait PMI dan Negara Tujuan

Kemampuan untuk memahami dan mematuhi regulasi, baik di Indonesia maupun di negara tujuan, adalah fondasi utama bagi keamanan dan keberhasilan bekerja di luar negeri. Penguatan literasi regulasi ini melibatkan pemahaman mendalam tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) serta hukum dan budaya kerja di negara tempat bekerja. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai pentingnya memahami regulasi PMI

1. Membaca regulasi yang berlaku di ketika menjadi CPMI

Calon PMI, keluarga, serta pihak-pihak terkait (SMK, P3MI, Disnaker) wajib memahami secara menyeluruh hak dan kewajiban PMI, prosedur penempatan yang legal, serta sanksi bagi pihak yang melanggar. Regulasi yang wajib di baca adalah Undang-undang yang mengatur ketenagakerjaan dan pekerja migran Indonesia yang menjadi payung hukum utama yang melindungi PMI dari eksploitasi dan penipuan.

2. Lisensi dan Legalitas P3MI

Calon PMI harus selalu memastikan bahwa P3MI yang digunakan memiliki izin resmi dan terdaftar di KP2MI/BP2MI. Literasi regulasi ini membantu mengidentifikasi praktik ilegal dan menghindari calo.

3. Hukum dan Budaya di Negara Tujuan

SMK harus memberikan pemahaman calon lulusan SMK yang minat bekerja di luar negeri terkait regulasi dan budaya di negara tujuan bekerja. Adapun unsur yang harus di beri pemahaman antara lain:

a. Hukum Ketenagakerjaan

Setiap negara memiliki undang-undang ketenagakerjaan yang berbeda terkait jam kerja, upah minimum, tunjangan, hak cuti, dan prosedur penyelesaian sengketa. Calon PMI harus dibekali pengetahuan dasar tentang hukum ini agar tidak mudah dirugikan.

b. Aturan Imigrasi dan Visa

Memahami jenis visa kerja, masa berlakunya, serta konsekuensi jika overstay atau melanggar aturan imigrasi adalah krusial.

c. Budaya Negara Tujuan

Penguasaan bahasa saja tidak cukup. Pemahaman tentang etika kerja, norma sosial, kebiasaan sehari-hari, dan nilai-nilai budaya di negara tujuan akan sangat membantu PMI beradaptasi dan menghindari kesalahpahaman yang dapat menimbulkan masalah

d. Nomor Darurat dan Kontak Penting

PMI harus dibekali informasi tentang nomor darurat kepolisian, rumah sakit, serta kontak Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia di negara tujuan sebagai jalur bantuan.

Penguatan literasi regulasi ini harus menjadi bagian terintegrasi dari program persiapan kerja di luar negeri, yang disosialisasikan secara aktif oleh SMK, Disnaker, dan KP2MI kepada calon PMI dan keluarga mereka. Hal ini bukan hanya tentang aturan, tetapi juga tentang pembekalan diri untuk keselamatan dan keberhasilan di perantauan.



BAB 5

Mekanisme Rekrutmen dan Penempatan Lulusan



Tahapan Umum Rekrutmen Calon Pekerja Migran

Lulusan SMK yang menjadi calon pekerja migran Indonesia harus memiliki persyaratan untuk mendaftar yang harus dipenuhi bagi calon Pekerja Migran Indonesia sebelum berangkat ke negara tujuan adalah sebagai berikut:

1. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
2. memiliki kompetensi sesuai perusahaan dan negara tujuan;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial; dan
5. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan perusahaan dan negara tujuan
6. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan
 - a. Surat Keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah
 - b. Kartu keluarga
 - c. Surat keterangan ijin suami atau istri (bagi yang sudah menikah), izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa
 - d. Sertifikat kompetensi kerja
 - e. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi
 - f. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat
 - g. Visa kerja
 - h. Perjanjian penempatan
 - i. Perjanjian Kerja

5.1.1 Seleksi

Pada keadaan tertentu keberangkatan PMI dilakukan seleksi untuk memastikan hanya kandidat terbaik yang terpilih secara profesional dan transparan. Berikut adalah tahapan seleksinya:

1. Screening CV

Peserta diminta mengirimkan CV mereka untuk dievaluasi oleh tim seleksi. Pada tahap ini, aspek seperti pengalaman kerja, keterampilan, dan latar belakang pendidikan dan pelatihan akan menjadi pertimbangan utama.

2. Tes Dasar Bahasa Inggris atau Asing Sesuai Negara Tujuan

Tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan dasar bahasa Inggris dan negara tujuan peserta, terutama dalam komunikasi sehari-hari di lingkungan kerja internasional.

3. Interview Tahap 1 dan 2

Peserta yang lolos tes bahasa Inggris dan negara tujuan akan mengikuti wawancara dengan tim seleksi dan pihak perusahaan mitra. Wawancara ini bertujuan untuk menilai kesesuaian kandidat dengan posisi yang ditawarkan.

4. Pengumuman

Peserta yang dinyatakan lolos seleksi akan menerima informasi resmi mengenai hasil seleksi dan persiapan keberangkatan.

5. Penempatan Kerja

Peserta yang diterima akan ditempatkan di lokasi kerja yang telah ditentukan sesuai dengan bidang dan keahlian mereka.

5.1.2 Pemenuhan Dokumen

Pemenuhan dokumen Pekerja Migran Indonesia (PMI) mencakup berbagai persyaratan administratif dan legal yang harus dipenuhi oleh calon PMI sebelum bekerja di luar negeri. Dokumen-dokumen ini memastikan bahwa PMI terlindungi secara hukum dan memiliki hak-hak yang jelas selama bekerja di negara tujuan.

5.1.3 Orientasi Pra

Pemberangkatan SMK memberikan pemahaman kepada murid atau lulusan SMK yang berminta bekerja ke luar negeri terkait adanya Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pembekalan informasi yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sebelum mereka berangkat bekerja ke luar negeri. Tujuannya adalah untuk memberikan kesiapan mental dan pengetahuan kepada murid atau lulusan SMK saat menjadi CPMI memahami hak dan

kewajiban mereka serta siap menghadapi tantangan di negara tujuan.

5.1.4 Pendataan Sidik Jari Biometrik

SMK memberikan pemahaman kepada murid atau lulusan SMK yang berminta bekerja ke luar negeri terkait adanya Pendataan sidik jari biometrik adalah proses mencatat dan menyimpan informasi sidik jari calon PMI secara individu untuk keperluan identifikasi atau verifikasi. Dalam konteks tertentu, sidik jari biometrik digunakan untuk memastikan identitas dan memfasilitasi proses keberangkatan adalah orang yang diakui, baik dalam konteks pendaftaran, transaksi, maupun akses ke sistem tertentu. Metode ini membantu meningkatkan keamanan karena sidik jari unik untuk setiap individu dan sulit untuk dipalsukan.

5.1.5 Pemberangkatan PMI ke Negara Tujuan

Selain persyaratan, KP2MI/BP2MI juga membuat alur prosedur yang perlu diikuti bagi Calon Pekerja Migran Indonesia lulusan SMK, meliputi:

1. Pendaftaran; syarat di atas.
2. Seleksi
3. Pemenuhan dokumen; paspor, MCU, Visa
4. Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP)
5. Pendataan Sidik Jari Biometrik;
6. pemberangkatan PMI ke negara tujuan

untuk mendapatkan informasi lebih komprehensif tentang skema penempatan PMI di luar negeri, dapat mengunjungi laman resmi KP2MI/BP2MI melalui tautan <https://aim.bp2mi.go.id/> sebagai referensi. di dalamnya terdapat informasi mengenai:

1. Skema Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Terdapat informasi terkait lima skema penempatan PMI beserta langkah- langkah yang perlu dilakukan mulai dari pendaftaran hingga pemberangkatan.

2. Daftar BP3MI dan P4MI

Terdapat informasi terkait Daftar Alamat Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) dan Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI).

3. Daftar P3MI

Terdapat informasi terkait Daftar Perusahaan Penyalur Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang masih aktif beroperasi dan terdaftar resmi di KP2MI/BP2MI.

4. Informasi Peluang Kerja Luar Negeri

Terdapat informasi terkait lowongan pekerjaan di luar negeri, lengkap dengan informasi negara tujuan, syarat apa saja yang dibutuhkan, gaji, siapa P3MI yang menyalurkan, dan beberapa informasi tambahan lainnya.

5. Daftar P3MI yang dicabut izinnya

Terdapat informasi terkait Daftar Perusahaan Penyalur Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang sudah tidak beroperasi atau sudah tidak terdaftar resmi di KP2MI/BP2MI.

6. Informasi Kepulangan

Terdapat informasi terkait mekanisme pelayanan kepulangan bagi PMI.

7. Informasi Pengaduan

Terdapat tertuang informasi terkait jenis layanan pengaduan yang disediakan oleh KP2MI/BP2MI bagi para PMI ataupun Calon PMI.

8. Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Dalam bagan ini, tertuang informasi hukum berupa peraturan perundang-undangan, regulasi, serta kebijakan terkait penempatan dan perlindungan PMI.



BAB 6

Keberlanjutan Akses Kebekerjaan Luar Negeri Bagi Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan



Pendanaan

Untuk mendukung dan memudahkan calon PMI dari murid SMK menjadi Calon PMI dan kepastian berangkat ke negara tujuan penempatan harus di dukung dari sisi pendanaan. Berdasarkan keputusan kepala BP2MI nomor 172 tahun 2024 Komponen yang membutuhkan pendanaan antara lain Pelatihan peningkatan kompetensi, jasa lembaga penyaluran resmi, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, pengesahan perjanjian pekerjaan, pengurusan keimigrasian (visa dan passport), transportasi dalam dan luar negeri. Adapun skema pendanaan yang dapat di tempuh dari calon PMI, antara lain :

6.1.1 Mekanisme Tabungan Sekolah (tabungan murid kelas X–XII)

SMK dapat membuat unit untuk mengumpulkan dana tabungan murid yang berminat menjadi PMI. Pengumpulan dana tabungan sebaiknya dimulai dari kelas awal saat ada peminatan murid. SMK harus mencairkan tabungan murid untuk dapat digunakan dan mendukung menjadi PMI. pembentukan unit pengumpulan dana tabungan murid berdasarkan surat keputusan kepala SMK.

6.1.2 DanaAlumni

Dana alumni adalah dana yang dikumpulkan dari para lulusan atau alumni SMK yang kemudian digunakan untuk keperluan pembelajaran dan peningkatan kompetensi murid yang memiliki keminatan jadi PMI. Dana alumni ini bisa berupa sumbangan sukarela, iuran, wakap atau hasil dari kegiatan penggalangan dana yang diselenggarakan oleh ikatan alumni. SMK membuat organisasi ikatan alumni khusus untuk mempermudah koordinasi dan komunikasi alumni SMK untuk membantu SMK dan adik kelasnya.

6.1.3 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)/Corporate Social Responsibility Industry

SMK dapat menggunakan dan mengoptimalkan CSR (Corporate Social Responsibility) untuk mendukung pembelajaran dan peningkatan kompetensi murid dalam persiapan menjadi PMI. Dalam mendapatkan CSR dari perusahaan SMK dapat melalui langkah-langkah:

Identifikasi Perusahaan Target

Lakukan riset untuk mengetahui perusahaan mana yang memiliki komitmen CSR dan bidang yang pendidikan dan peningkatan kompetensi. SMK dapat mengoptimalkan mitra perusahaan dan industrinya yang sudah bekerjasama dengan SMK

- a. Perusahaan terkadang merilis *Request for Proposal* (RFP) untuk CSR. SMK harus Pantau situs web atau platform terkait untuk mencari RFP yang sesuai kebutuhan SMK dalam pembelajaran dan persiapan. Apabila tidak ada RFP di situs/laman resmi, SMK dapat hubungi perusahaan terkait secara langsung melalui email atau telepon. Siapkan basis data donatur CSR untuk mempermudah komunikasi dengan perusahaan atau industri
- b. SMK Menyusun Proposal yang Menarik dengan menyampaikan visi dan misi perusahaan target, termasuk fokus pada isu-isu yang relevan. Buat program yang memiliki dampak nyata, terukur, dan berkelanjutan. Libatkan guru, murid dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan peningkatan kompetensi murid. Sampaikan Susun rencana pelaksanaan yang matang, termasuk anggaran, jadwal, dan sumber daya yang dibutuhkan

6.1.4 Skema Kredit P3MI/BUMN (dengan bunga ringan)

Murid SMK dapat membuat rekening di BANK yang memiliki Tabungan Rencana (MTR) merupakan produk tabungan berjangka dengan setoran wajib bulanan selama jangka waktu tertentu yang dilengkapi dengan perlindungan asuransi. Tabungan dapat berbentuk mata uang Rupiah dan USD. Murid dapat menyetorkan dana ke rekening secara rutin. Dana tabungan murid yang berminat menjadi PMI dan dapat dicairkan saat mau digunakan dan mendukung menjadi PMI. pembentukan tabungan atau penyetoran di bank dapat dilakukan secara mandiri oleh murid atau di kolektifkan oleh pihak petugas SMK berdasarkan surat keputusan kepala SMK.

6.1.5 Beasiswa P3MI untuk siswa prasejahtera

Salahsatu program beasiswa yang ditawarkan dapat diperoleh dari Lembaga Pelatihan Kerja dalam bentuk program pelatihan, terutama yang berkaitan dengan kerja di negara tujuan bekerja. Beasiswa ini bisa berupa potongan biaya pelatihan, bantuan biaya hidup, atau bahkan

pembiayaan penuh untuk pelatihan dan keberangkatan negara tujuan. SMK atau murid mencari informasi melalui internet maupun langsung ke lembaga yang menawarkan beasiswa.

6.1.6 Urun Dana/Crowdfunding komunitas sekolah

Crowdfunding adalah metode pengumpulan dana yang melibatkan sejumlah orang atau masyarakat sekolah untuk mendukung dan tertarik dalam pembelajaran dan peningkatan kompetensi, bisnis, kreativitas, atau tujuan sosial di SMK. Pihak SMK atau murid bisa memperoleh dengan cara pembuatan proposal yang menarik secara *online* maupun langsung.

Strategi Penguatan Keberlanjutan

Untuk memastikan keberlanjutan progra mini, terdapat beberapa strategi yang diterapkan, yakni:

6.2.1 EdukasidanSosialisasi

Penguatan akses ke pekerjaan luar negeri bagi lulusan SMK, akan dapat terus berlanjut apabila seluruh pihak yang terlibat sadar akan pentingnya dan kebermanfaatan atas program ini. Untuk itu perlu dilakukan program edukasi dan sosialisasi yang tersistematis dan menjangkau berbagai pihak yang terlibat di dalam program ini. Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi dapat melibatkan para lulusan SMK yang telah berhasil mengikuti program ke pekerjaan ke luar negeri untuk sharing mengenai success storynya sehingga dapat menjadi role model bagi murid maupun lulusan lainnya

6.1.2 Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi menjadi salah satu strategi kunci dalam keberlanjutan pelaksanaan program ini. Perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan selanjutnya menyusun rencana tindak lanjut atas hasil evaluasi yang dilakukan. Di dalam pemantauan dan evaluasi, hendaknya juga dilakukan identifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi dalam program, menentukan pembagian tugas dan tanggung jawab serta timeline yang jelas untuk setiap rencana tindak lanjutnya.

BAB 7

Pencegahan Praktik Nonprosedural dan Perdagangan Orang





Waspada Perdagangan Orang dan Praktik Penempatan Nonprosedural

Dalam upaya pencegahan TPPO calon PMI dari lulusan SMK dibutuhkan sinergi yang seiring dan seimbang antara SMK, pemerintah daerah/pusat dan murid SMK sebagai calon pekerja migran Indonesia, yang dalam hal ini pemerintah bertanggungjawab terhadap jaminan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri di samping wajib tunduk dan patuh pada prosedur yang harus dilalui untuk menjadi seorang pekerja migran Indonesia.

SMK selain meningkat bahasa dan kompetensi harus juga memberikan pengetahuan kepada murid dan peningkatan kesadaran orangtua murid dalam Pencegahan praktik ilegal perdagangan manusia melibatkan berbagai modus operandi. Berikut adalah beberapa upaya konkret SMK yang dapat dilakukan

1. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan:
 - a. Sosialisasi dan pendidikan tentang bahaya perdagangan manusia, modus operandi pelaku, dan hak-hak korban
 - b. Pendidikan tentang migrasi yang aman dan prosedur yang benar untuk bekerja di luar negeri
 - c. Penggunaan media sosial dan platform online untuk menyebarkan informasi dan kampanye pencegahan.
 - d. Berkerjasama dengan dinas tenaga kerja, P3MI dalam pencegahan dan penanganan TPPO dalam pertukaran informasi dan pengalaman dalam upaya pencegahan dan penanganan.

2. perlindungan sebelum keberangkatan bekerja, mencakup perjanjian kerja, administratif dan teknis.
3. perlindungan selama bekerja, mencakup:
 - a. pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk;
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja;
 - c. fasilitasi pemenuhan hak pekerja migran Indonesia;
 - d. fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan;
 - e. pemberian layanan jasa kekonsuleran;
 - f. pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh pemerintah pusat dan/atau perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat
 - g. pembinaan terhadap pekerja migran Indonesia; dan
 - h. fasilitasi repatriasi.
4. perlindungan setelah bekerja, mencakup:
 - a. fasilitasi kepulangan sampai daerah asal;
 - b. penyelesaian hak pekerja migran Indonesia yang belum terpenuhi;
 - c. fasilitasi pengurusan pekerja migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia;
 - d. rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan
 - e. pemberdayaan pekerja migran Indonesia dan keluarganya.

Cakupan TPPO

Untuk membangun kesadaran kepada Calon PMI tentang cakupan TPPO biasanya melingkupi Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari

orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun saat di negara penempatan, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Adapun indikator TPPO antara lain:

1. Tidak menerima upah (dibayar hanya sejumlah kecil) imbalan bagi pekerjaan yang dilakukanya.
2. Tidak dapat mengelola sendiri upah yang diterima atau harus menyerahkan sebagian besar upahnya kepada pihak ketiga (perantara, agen, majikan, dalam bisnis pelacuran: pengelola rumah bordir, mucikari);
3. Adanya jeratan utang (misalnya saja untuk membayar biaya pengganti rekrutmen, jasa perantara, biaya perjalanan, dll).
4. Pembatasan atau perampasan kebebasan bergerak (mis. tidak boleh meninggalkan tempat kerja atau penampungan untuk jangka waktu lama, dibawah pengawasan terus-menerus).
5. Tidak diperbolehkan (dengan ancaman/kekerasan) berhenti bekerja
6. Isolasi/pembatasan kebebasan untuk mengadakan kontak dengan orang lain (keluarga, teman, dll).
7. Ditahan atau tidak diberikannya pelayanan kesehatan, makanan yang memadai, dll.
8. Pemerasan atau ancaman pemerasan terhadap keluarga atau anak-anaknya
9. Ancaman penggunaan kekerasan.
10. Diharuskan bekerja dalam kondisi yang sangat buruk dan/atau harus bekerja untuk jangka waktu yang sangat panjang.
11. Tidak membayar sendiri atau mengurus sendiri perjalanan, visa, paspor, dll.
12. Tidak memegang sendiri surat-surat identitas diri atau dokumen perjalanannya.
13. Menggunakan paspor atau identitas palsu yang disediakan oleh pihak ketiga.

Modus Calo P3MI Nonprosedural

1. Iming-iming gaji penghasilan yang besar dengan kerja yang ringan tidak perlu ada kompetensi khusus, pendidikan, meminta uang jaminan.
2. Melibatkan aparaturnya kemasyarakatan untuk bujuk rayu dan sebagai legalitas menyakinkan.

3. Menggunakan visa turis
4. Keberangkatan tidak mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh KP2MI
5. Tidak ada ijin operasional P3MI
6. Memberikan uang di awal

Korban TPPO

Berdasarkan kasus yang pernah terjadi pada korban TPPO akan mengalami kerugian besar seperti:

1. Paksaan kerja ilegal di negara konflik
2. Perdagangan organ dan eksploitasi seksual
3. Prostitusi
4. Pernikahan Paksa
5. Kurir narkoba
6. Operator judi *online* (*Online Scamming*)

Kejadian Kasus yang Pernah Terjadi Di Luar Negeri

Tujuan penempatan PMI pernah ada terjadi dan perlu imbauan didasari waspada oleh pemerintah Indonesia. Imbauan dan kewaspadaan tersebut sebagai langkah perlindungan pemerintah Indonesia untuk PMI adapun dasar kewaspadaan antara lain:

1. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
2. Negara/wilayah konflik
3. Negara yang tidak memiliki kerja sama dengan Indonesia

Adapun larangan negara tujuan harus didasari atau ditetapkan oleh KP2MI dan/atau kementerian luar negeri (Kemlu). Berdasarkan pengalaman Kejadian yang pernah terjadi

Tabel 7.1. Larangan untuk Tujuan Pekerjaan di Luar Negeri

No	Potensi Resiko	Lingkup Resiko yang Pernah Terjadi
1	Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Perdagangan manusia yang sering kali dimulai dengan tawaran pekerjaan yang menggiurkan melalui media sosial atau agen-agen ilegal. Tawaran-tawaran ini sering kali menjanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di sektor yang tidak jelas, namun kenyataannya, para korban justru dipaksa bekerja di sektor ilegal seperti judi <i>online</i> dan penipuan daring (<i>scamming</i>), prostitusi dan penjualan organ tubuh. Peristiwa TPPO yang pernah terjadi di beberapa negara antara lain Thailand, Myanmar, Kamboja, Vietnam, dan China.
2	Negara/wilayah konflik	negara yang terlibat dalam ketegangan, perselisihan, atau bentrokan dalam negara maupun dengan negara lain, baik secara verbal maupun fisik. Konflik ini bisa beragam, mulai dari perbedaan kepentingan, sengketa wilayah, hingga konfrontasi bersenjata. Peristiwa negara yang berkonflik antara lain Afganistan, Libya, Somalia, Yaman, Kongo, Sudan, Myanmar, Lebanon, Suriah, Palestina, Israel, dan Ukraina.
3	Negara yang tidak memiliki kerja sama penempatan PMI	Penempatan PMI melibatkan kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara tujuan. Kerjasama ini biasanya mencakup perjanjian bilateral yang mengatur berbagai aspek, termasuk perlindungan pekerja, standar gaji, dan kondisi kerja. negara yang belum memiliki kerjasama antara lain Israel, Filipina, Korea Utara, Kamboja, Myanmar, Laos. Thailand, dll.

Perlindungan dan Pendampingan Oleh Perwakilan Pemerintah RI





Perwakilan RI adalah singkatan dari Perwakilan Republik Indonesia, yang merujuk pada lembaga atau kantor yang mewakili Indonesia di negara lain atau organisasi internasional. Perwakilan RI terdiri dari Perwakilan Diplomatik yaitu :

1. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) merupakan perwakilan diplomatik utama di suatu negara, yang bertugas mewakili kepentingan Indonesia secara keseluruhan di negara tersebut termasuk perlindungan WNI yang bekerja di luar negeri.
2. Perwakilan Konsuler yaitu Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) dan Konsulat Republik Indonesia (KRI) merupakan Perwakilan konsuler yang bertugas memberikan pelayanan konsuler kepada WNI di wilayah kerja mereka, seperti penerbitan dokumen, pelayanan kekonsuleran, dan perlindungan WNI termasuk PMI.

Perlindungan Sebelum Bekerja

Pelindungan sebelum bekerja menekankan pada kesiapan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja ke luar negeri. Dalam pelindungan sebelum bekerja, Pemerintah memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan, dan penetapan kondisi dan syarat kerja.

Selain itu perlindungan sebelum bekerja juga mencakup antara lain pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi, peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja, Jaminan Sosial, fasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia.

Perlindungan Selama Bekerja

Pemerintah Indonesia tetap hadir melakukan perlindungan warga negara Indonesia selama bekerja di luar negeri, adapun perlindungan pemerintah Indonesia mencakup hal-hal sebagai berikut antara lain:

1. pendataan WNI berada di negara penugasannya yang kedatangannya secara resmi;
2. menyediakan laman website <https://peduliwni.kemlu.go.id> untuk pelayanan melaporkan secara online ketika WNI termasuk PMI yang sudah di negara tujuan
3. pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberi Kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja
4. fasilitasi pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia; fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan;
5. pemberian layanan jasa kekonsuleran;
6. pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat; dan
7. pembinaan terhadap Pekerja Migran Indonesia; dan fasilitasi repatriasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia selama bekerja tersebut dilakukan dengan tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata Pekerja Migran Indonesia dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional

Perlindungan Setelah Bekerja

Pelindungan Setelah Bekerja bagi Pekerja Migran Indonesia dilakukan oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah secara bersama-sama yang mencakup: fasilitasi kepulangan sampai daerah asal; penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi; fasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia; rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Perwakilan Indonesia di suatu negara memiliki pejabat atase diplomatik yang ditugaskan yang memiliki tugas di luar negeri untuk mewakili kepentingan Indonesia dalam bidang tertentu. Atase ditempatkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), atase juga memiliki tugas atas perlindungan WNI yang ada di negaranya termasuk PMI, adapun atase yang ada antara lain:

1. Atase Pertahanan

Bertanggung jawab atas hubungan pertahanan dan kerjasama militer antara Indonesia dan negara tempat mereka bertugas.

2. Atase Perdagangan

Fokus pada promosi perdagangan dan investasi antara Indonesia dan negara tempat mereka bertugas.

3. Atase Pendidikan dan Kebudayaan

Membantu mempromosikan pendidikan dan kebudayaan Indonesia di luar negeri serta membina hubungan pendidikan dan budaya

4. Atase Imigrasi

Mengurusi masalah keimigrasian, seperti pelayanan keimigrasian, lapor diri, dan perpanjangan paspor WNI di luar negeri

5. Atase Imigrasi

Terdapat juga atase untuk bidang-bidang lain seperti perhubungan, keuangan, kehutanan, pertanian, dan lainnya, tergantung pada kebutuhan perwakilan.

BAB 9

Penutup



Pedoman ini telah disusun sebagai panduan strategis yang komprehensif, bertujuan untuk membuka pintu bagi para lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Indonesia menuju karier global yang menjanjikan. Melalui analisis mendalam tentang profil dan peluang yang ada, pedoman ini tidak hanya menguraikan potensi pasar kerja internasional, tetapi juga menyediakan strategi penyiapan lulusan SMK yang terencana dan sistematis. Mulai dari peningkatan kompetensi teknis, penguasaan bahasa asing, hingga pemahaman budaya kerja global, setiap langkah telah dirancang untuk memastikan bahwa lulusan SMK tidak hanya siap bersaing, tetapi juga mampu beradaptasi dengan tuntutan profesional di berbagai negara. Kesuksesan implementasi pedoman ini akan menjadi katalisator bagi peningkatan kualitas pendidikan kejuruan di tanah air, menjembatani kesenjangan antara kurikulum sekolah dengan kebutuhan industri global, dan pada akhirnya, menciptakan generasi muda yang memiliki daya saing tinggi di kancah internasional.

Keberhasilan program ini sangat bergantung pada tata kelola, koordinasi, dan mekanisme implementasi yang solid. Pedoman ini menegaskan pentingnya kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan industri, baik di dalam maupun luar negeri. Dengan adanya mekanisme rekrutmen dan penempatan yang terstruktur, kita dapat memastikan bahwa setiap proses berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Lebih dari sekadar penempatan, pedoman ini juga menitikberatkan pada aspek keberlanjutan akses ke pekerjaan ke luar negeri, yang mencakup persiapan dan pengembangan model pembelajaran, peningkatan keterampilan berkelanjutan, dan pembinaan jaringan profesional bagi para alumni. Komitmen bersama untuk menjalankan pedoman ini secara terintegrasi akan membangun fondasi yang kuat bagi program yang tidak hanya efektif, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang, memberikan manfaat nyata bagi seluruh pemangku kepentingan.

Pada akhirnya, pedoman ini tidak hanya berfokus pada strategi dan mekanisme, tetapi juga menempatkan pencegahan praktik nonprosedural dan perdagangan orang, serta perlindungan dan pendampingan sebagai pilar utama. Keselamatan, kesejahteraan, dan hak-hak setiap lulusan SMK yang berkarya di luar negeri adalah prioritas tertinggi. Perwakilan pemerintah di luar negeri berkomitmen penuh untuk memberikan perlindungan dan pendampingan yang diperlukan, memastikan para pekerja Indonesia merasa aman dan dihargai. Dengan pedoman ini, kita menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk mempersiapkan sumber daya manusia unggul yang berintegritas, beretika, dan profesional yang siap bekerja ke luar negeri.

Pedoman ini adalah wujud nyata dari salah satu optimisme kita terhadap masa depan lulusan SMK, yang akan menjadi duta-duta bangsa di luar negeri dan berkontribusi secara signifikan pada kemajuan ekonomi nasional dan hubungan diplomatik antar negara.

